

Sorong, 10 Maret 2026

Nomor : 7.1/SPny/BPP-PBD/SOQ/III/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Bulanan BPP
Periode Bulan Februari 2026**

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Di -
Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) Badan Pengarah Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, serta menindaklanjuti Surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Februari 2026.**

Laporan tersebut memuat uraian pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang meliputi aspek kelembagaan, pelaksanaan SHEK pada masing-masing misi percepatan pembangunan Papua (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai/Polhukam), dokumentasi kegiatan, capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang solutif.

Adapun dokumen laporan dimaksud dapat diakses melalui tautan berikut:
<https://drive.google.com/drive/folders/1blKZf9QIUabHz-RSDvr9BvH7u2POGwUD?usp=sharing>

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terimakasih.

**Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,**

DRS. OTTO IHALAUW, MA

Tembusan:

1. Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari
2. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
PAPUA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SORONG
Jl. Basuki Rahmat KM 7, Kota Sorong 98416; TELEPON (0951) 321250, 321262; FAKSIMILI (0951) 321096; SUREL
kppn066@kemenkeu.go.id; SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong

NOTA DINAS
NOMOR ND-133/KPN.3302/2026

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sorong
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi
Papua Barat Daya Bulan Februari 2026
Tanggal : 25 Maret 2026

Sehubungan dengan surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura nomor S-3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, serta menindaklanjuti surat Anggota BPP Provinsi Papua Barat Daya nomor 7/SPny/BPP-PBD/SOQ/III/2026 hal Penyampaian Laporan Bulanan BPP Periode Bulan Februari 2026, bersama ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya Periode Februari 2026**, sebagaimana terlampir.

Laporan tersebut memuat uraian pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang meliputi aspek kelembagaan, pelaksanaan SHEK pada masing-masing misi percepatan pembangunan Papua (Sehat, Cerdas, Produktif, Damai/Polhukam), dokumentasi kegiatan, capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang solutif..

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

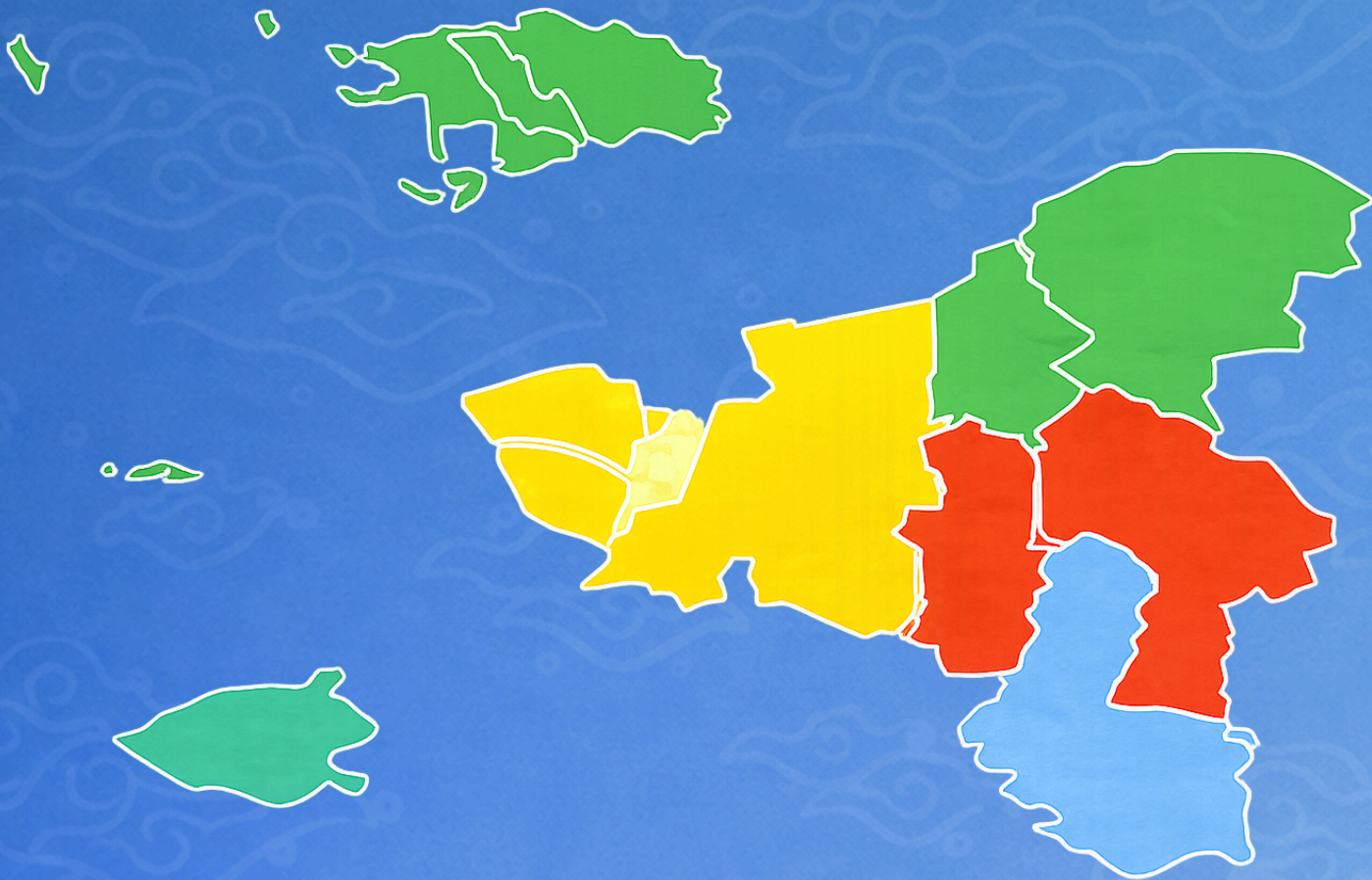


Ditandatangani secara elektronik
Jaka Trisna

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENGARAH PAPUA PERIODE BULAN FEBRUARI 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Bulan Februari Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, serta masukan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis ke depan.

Selama periode Februari 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi fungsi pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

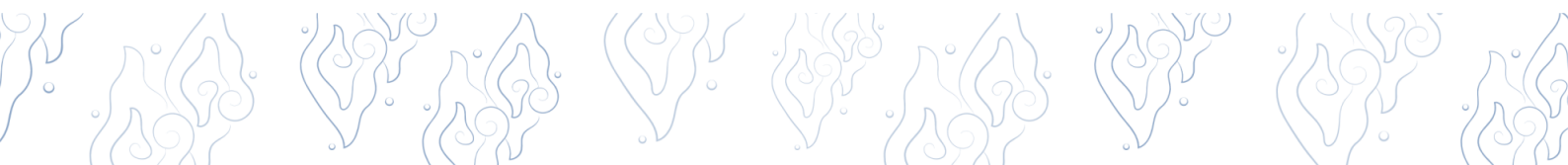
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua Barat Daya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Dasar Hukum (Landasan).....	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II KELEMBAGAAN BPP.....	7
2.1 Definisi BPP	7
2.2 Tugas BPP	7
2.3 Fungsi BPP.....	7
2.4 Struktur BPP	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	9
3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat.....	9
3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas	30
3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif.....	43
3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)	63
3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi).....	71
BAB IV CAPAIAN, PERMASALAHAN, TANTANGAN.....	106
4.1 Capaian.....	106
4.2 Permasalahan.....	108
4.3 Tantangan	109
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Rekomendasi	111
5.3 Penutup.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum (Landasan)

- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- D. Kelembagaan Badan Pengarah Papua
 1. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 2. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
 3. Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
 4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan BP3OKP.
 5. Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- E. Arah Kebijakan Pembangunan Papua
 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
 3. Peraturan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Februari 2026 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya, serta sebagai media dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

2. Tujuan

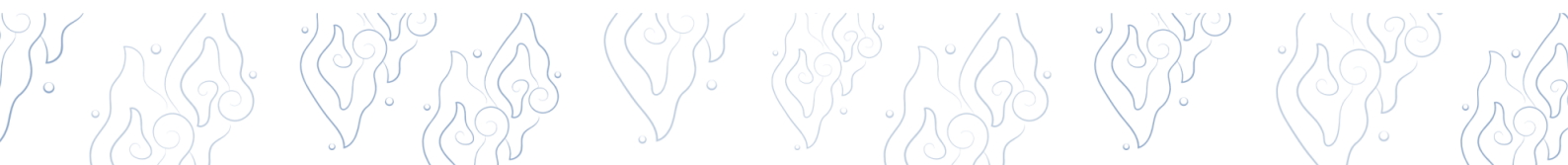
Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Februari 2026.
2. Menggambarkan capaian, perkembangan, serta hasil kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam kerangka misi RIPP.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

1.3 Ruang Lingkup

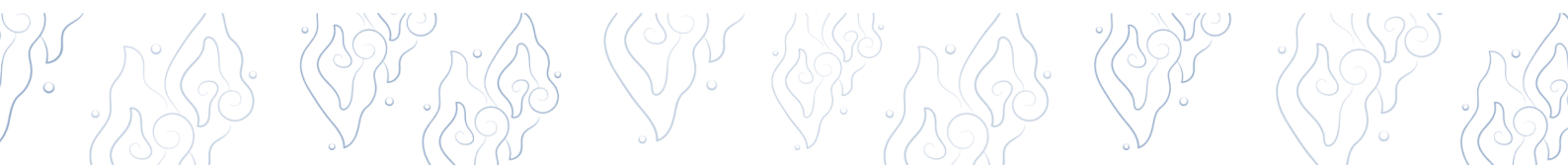
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Februari 2026 ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengarah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama periode 1–28 Februari 2026. Ruang lingkup laporan meliputi:

1. Pelaksanaan pengarahan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan serta Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Pelaksanaan kegiatan strategis dalam kerangka misi RIPPP.
3. Capaian yang diperoleh selama periode pelaporan, termasuk hasil koordinasi dan rekomendasi yang dihasilkan.
4. Identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah.

Laporan ini disusun sebagai gambaran komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode pelaporan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.



BAB II

KELEMBAGAAN BADAN PENGARAH PAPUA

2.1 Definisi BPP

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

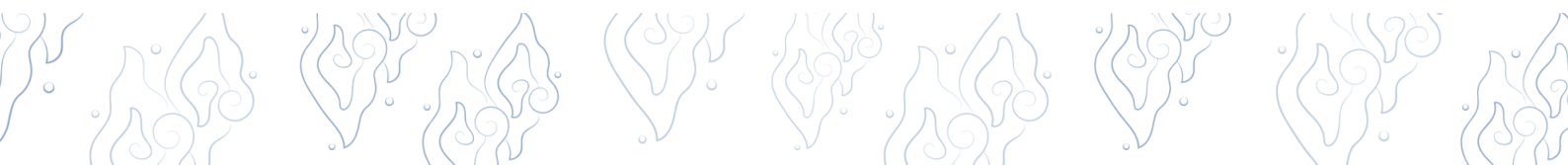
2.2 Tugas BPP

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua bertugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Fungsi BPP

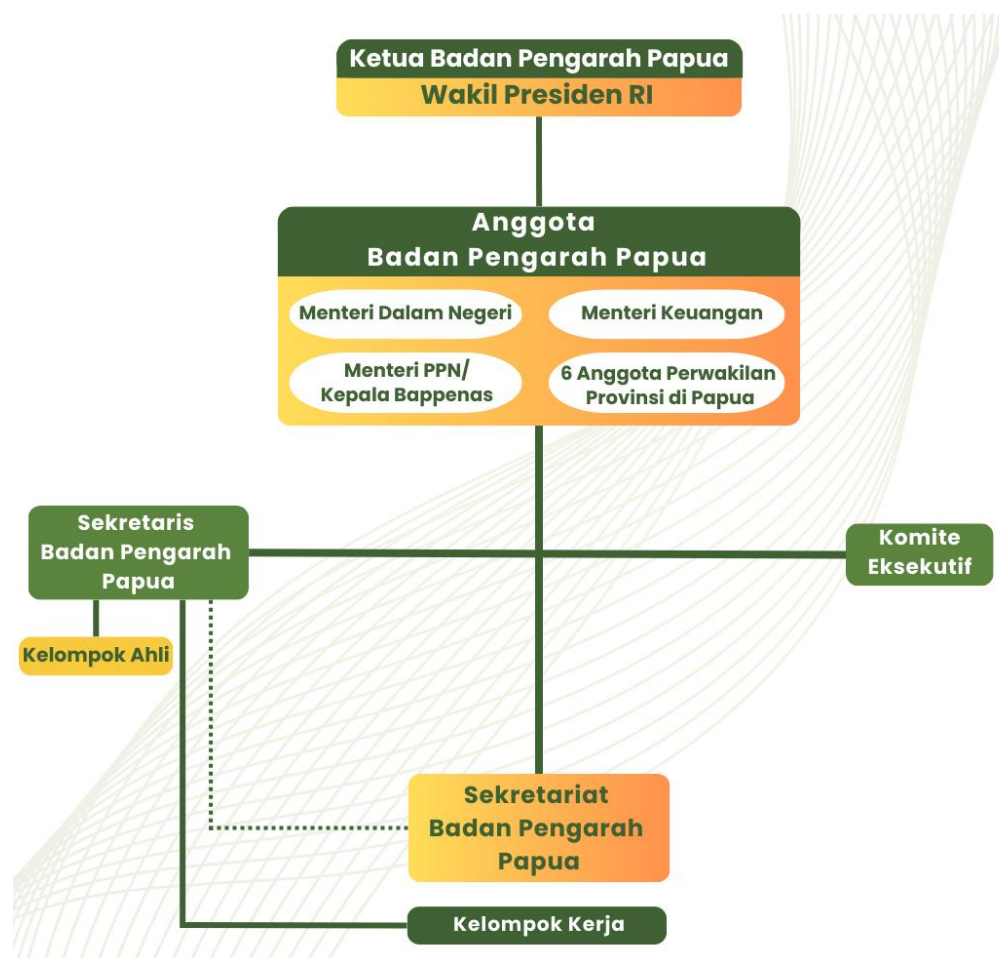
Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan



- percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
- c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.4 Struktur BPP



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Sehat

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Sinergi BPP PBD bersama Siloam Group dalam rangka Mendukung Misi Papua Sehat di Papua Barat Daya (Pertemuan Awal)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 3 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Pertemuan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan koordinasi awal dalam rangka menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan pertemuan lanjutan yang akan membahas lebih lanjut mengenai rencana investasi layanan kesehatan oleh pihak swasta di Papua Barat Daya.</p> <p>Pertemuan ini merupakan pertemuan awal yang bertujuan untuk mempersiapkan agenda pertemuan lanjutan yang direncanakan pada tanggal 4 Februari 2026, terkait rencana investasi sektor kesehatan oleh pihak swasta di Kota Sorong.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara BPP Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, dan pihak Rumah Sakit Siloam terkait format kegiatan serta tata cara pelaksanaan pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya 3. Tim Advance RS Siloam 4. Tim Legal Pemerintah Kota Sorong

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka mendukung rencana pengembangan investasi sektor kesehatan di Papua Barat Daya.
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan pertemuan lanjutan. 2. Penyusunan susunan kegiatan pertemuan. 3. Pengecekan berkas dan dokumen yang akan digunakan dalam pembahasan.
Hasil Kegiatan	Tercapainya kesepakatan mengenai poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Pelaksanaan pertemuan lanjutan yang direncanakan pada tanggal 4 Februari 2026.
Dokumentasi	

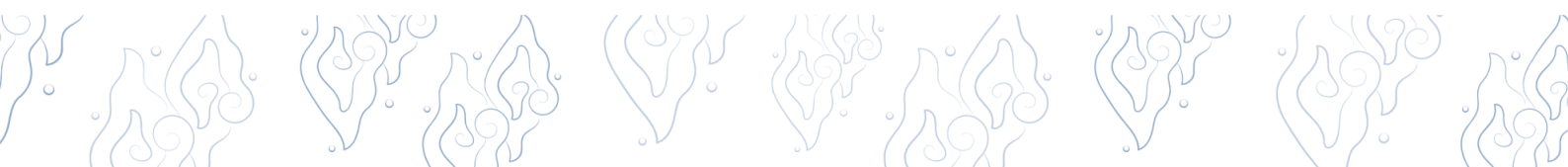
Kegiatan 2

Nama Kegiatan	BPP PBD Fasilitasi Sinergi Pemda Papua Barat Daya dan Kota Sorong bersama Siloam Group dalam Rencana Kerja Sama Strategis Bidang Kesehatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 4 Februari 2026 bertempat di Hotel Aston Sorong serta pada lokus rencana pembangunan RS Siloam di Kota Sorong
Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Sorong melalui Surat Keputusan Wali Kota Sorong Nomor 100.3.3.3/40/2025 membentuk Tim Pengawasan Pembangunan Gedung RS Siloam dan Hotel Aryaduta. • Proses ini muncul sebagai upaya memastikan kejelasan status legal tanah, kelengkapan dokumen administrasi, serta skema kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota Sorong dan pihak Siloam Group. • Tahapan awal telah dimulai pada Mei–Juli 2025 yang meliputi klarifikasi status tanah, konfirmasi skema PKS, serta pertemuan antar pemangku kepentingan. Tahap awal tersebut dinyatakan selesai pada tanggal 7 Juli 2025 yang ditandai dengan penyerahan fotokopi sertifikat tanah oleh Lazarus Osok serta klarifikasi dari BPN Kota Sorong bahwa pengecekan status tanah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tercatat sebagai pemilik sertifikat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati status legal aset tanah RS Siloam sebagai dasar pelaksanaan kerja sama. 2. Menentukan pihak yang berwenang dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 3. Menyusun kelengkapan dokumen legal dan administrasi yang diperlukan. 4. Merumuskan skema kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	5. Menghasilkan kesepakatan bersama terkait tahapan pelaksanaan kerja sama, timeline kegiatan, serta mekanisme koordinasi lanjutan.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Sorong (Sekretaris Daerah, OPD teknis terkait, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya) 2. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 3. BPP PBD: Anggota BPP PBD dan Anggota Pokja Papua Sehat 4. RS Siloam/Siloam Group 5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Memberikan pertimbangan dan saran terhadap isu strategis dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Legal Tanah RS Siloam <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan kepemilikan dan sertifikat tanah sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama. • Konfirmasi bahwa tanah telah menjadi milik Pemerintah Kota Sorong. 2. Kewenangan Penandatanganan PKS <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan pihak yang sah dan berwenang dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 3. Kelengkapan Dokumen Legal dan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat tanah, data aset, rancangan atau skema PKS, telaahan hukum dari OPD terkait, serta persetujuan internal yang diperlukan. 4. Skema Kerja Sama Sesuai Regulasi <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan PKS yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kota Sorong dan Siloam Group. <p>5. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Sorong sebagai pemilik dan pengelola aset. • RS Siloam sebagai mitra kerja sama. • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai fasilitator dan penguat kebijakan. • BP3OKP/Pokja Papua Sehat sebagai pihak yang melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK). <p>6. Output yang Diharapkan dari Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya kesepahaman bersama terkait status aset. • Kesepakatan tahapan penyusunan PKS. • Penunjukan OPD penanggung jawab tindak lanjut. • Kesepakatan timeline kegiatan serta mekanisme koordinasi lanjutan.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>Tercapainya kesepahaman bersama mengenai langkah-langkah penyelesaian aspek legal dan administratif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan RS Siloam di Kota Sorong sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan dasar hukum yang jelas serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Sorong dan pihak Siloam Group. 2. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan oleh lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, atau KPK untuk memastikan proses kerja sama berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumentasi



Kegiatan 3

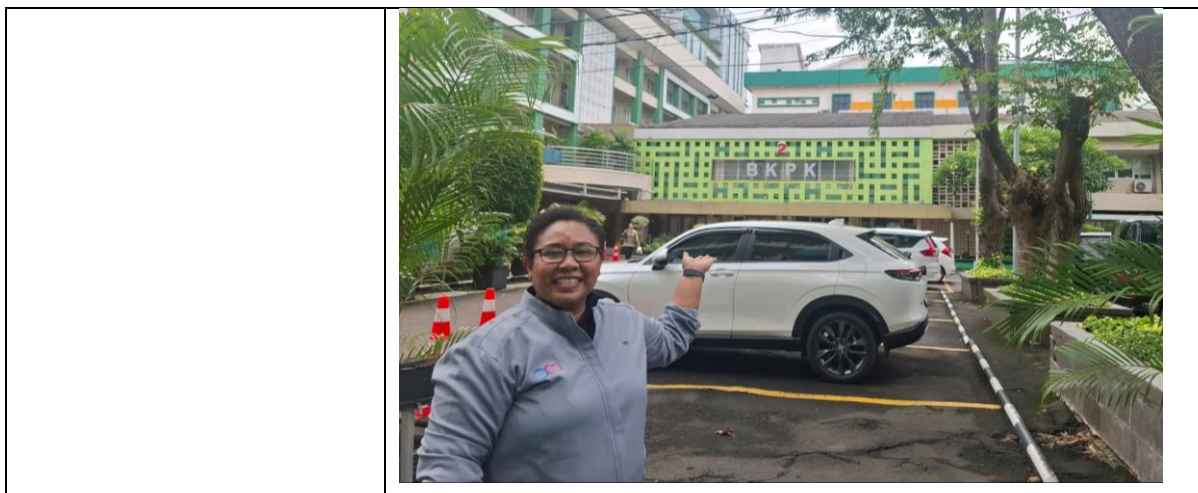
Nama Kegiatan	Pendampingan BPP Papua Barat Daya pada pertemuan lanjutan antara Pemerintah Kota Sorong dan Siloam Group terkait rencana kerja sama investasi bidang kesehatan di Kota Sorong (Jakarta)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 5 Februari 2026 bertempat di Jakarta
Latar Belakang	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya antara para pemangku kepentingan terkait rencana investasi di bidang kesehatan di Kota Sorong, khususnya mengenai rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Sorong dan Siloam Group.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dalam pembahasan rencana investasi di bidang kesehatan di Kota Sorong.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya 3. Wali Kota Sorong 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong 5. Perwakilan Siloam Group
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka mendukung percepatan kerja sama investasi sektor kesehatan di Kota Sorong.
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja sama lanjutan antara Pemerintah Kota Sorong dan Siloam Group. 2. Upaya percepatan proses perizinan dalam rangka mendukung pelaksanaan investasi di bidang kesehatan.
Hasil Kegiatan	Tersusunnya rencana tindak lanjut terkait penyelesaian kerja sama yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Dilakukan telaah lebih lanjut terhadap rencana penyusunan perjanjian kerja sama antara para pihak terkait.
Dokumentasi	

Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Pertemuan BPP PBD dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI dalam rangka Pengajuan Permohonan Audiensi Penyelarasan Pembangunan Kesehatan di Wilayah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 6 Februari 2026 bertempat di Kantor Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Jakarta
Latar Belakang	Badan Pengarah Papua melaksanakan koordinasi dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI yang memiliki Bina Wilayah (BinWil) untuk wilayah Papua. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa permohonan koordinasi antara BinWil BKPK dengan enam anggota Pokja Sehat BPP di Tanah Papua telah diterima, serta untuk melakukan sinkronisasi terhadap arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan di Tanah Papua.

Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan koordinasi terkait rencana pertemuan antara BinWil BKPK Kementerian Kesehatan RI dengan enam anggota Pokja Papua Sehat BPP di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya 2. Staf Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI 3. dr. Tri Maharani, Sp.EM (K)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Papua.
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan untuk menyamakan persepsi terkait pembangunan di bidang kesehatan di Tanah Papua. 2. Keselarasan antara Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) dengan kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Hasil Kegiatan	Disepakati rencana pelaksanaan pertemuan lanjutan antara BKPK Kementerian Kesehatan RI dengan enam anggota Pokja Papua Sehat BPP di Tanah Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Perlu dilaksanakan pertemuan lanjutan antara enam anggota Pokja BPP di Tanah Papua dengan BKPK Kementerian Kesehatan RI guna menyamakan persepsi terkait arah kebijakan pembangunan kesehatan di Tanah Papua.
Dokumentasi	




Kegiatan 5

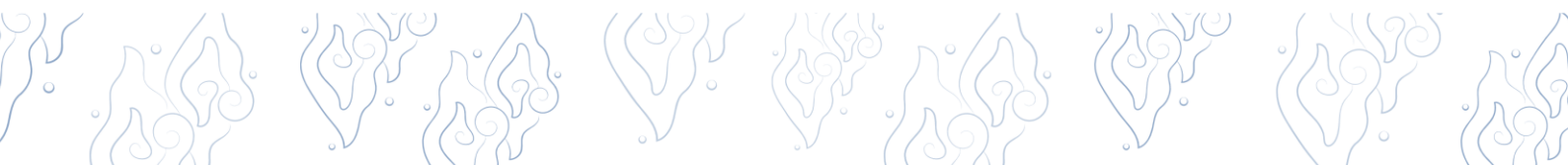
Nama Kegiatan	Forum SHEK Misi Papua Sehat: Penguatan Sistem Public Safety Center (PSC) 119 di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 11 Februari 2026 bertempat di Aula KPPN Sorong
Latar Belakang	<p>Penanganan kasus kegawatdaruratan di lapangan, baik yang berkaitan dengan kesehatan, bencana alam, maupun kecelakaan lalu lintas, membutuhkan sistem komunikasi dan koordinasi yang cepat, tepat, dan terintegrasi.</p> <p>Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh keterlambatan penanganan kasus emergency. Oleh karena itu, diperlukan sistem terpadu berbasis digital yang mampu menghubungkan berbagai sektor, antara lain Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, BNPB, Diskominfo, dan pemadam kebakaran.</p> <p>Public Safety Center (PSC) 119 hadir sebagai sistem komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas institusi untuk memastikan penanganan kasus emergency dapat dilakukan secara lebih efektif. Forum SHEK ini diselenggarakan untuk membangun kesepahaman</p>

	bersama, menyatukan komitmen lintas instansi, serta menyusun langkah-langkah tindak lanjut dalam mewujudkan implementasi PSC 119 yang solid dan aplikatif di Provinsi Papua Barat Daya.
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka menyatukan pemahaman dan persepsi lintas instansi terkait konsep, peran, dan mekanisme implementasi Public Safety Center (PSC) 119 sebagai sistem layanan darurat terintegrasi di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Menegaskan dan memperkuat komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam membangun serta mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi berbasis digital yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas penanganan kondisi darurat (emergency). 3. Menyusun dan menyepakati rencana tindak lanjut implementasi PSC 119 yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan rencana kerja pemerintah daerah serta didukung melalui penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan darurat yang terpadu dan responsif. 5. Mendukung upaya penurunan angka kematian dan risiko fatalitas akibat keterlambatan penanganan kasus emergency di lapangan melalui penguatan sistem PSC 119 yang efektif dan berkelanjutan.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPP Papua Barat Daya 2. Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI 3. UNIPA 4. Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dinas Kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya 6. Pihak Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong 7. Polresta Sorong Kota 8. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya 9. BNPB 10. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Materi 1 (daring): Arah kebijakan nasional penguatan PSC 119 sebagai sistem layanan darurat terintegrasi. 2. Pemaparan Materi 2: Best practice serta rencana tindak lanjut pengaktifan kembali PSC 119 di Kota Sorong. 3. Pemaparan Materi 3: Urgensi layanan pre-hospital dalam penanganan kegawatdaruratan serta dampaknya terhadap pelayanan rumah sakit. 4. Pemaparan Materi 4: Peran perguruan tinggi negeri dalam penguatan sistem PSC 119 melalui pendidikan, riset, dan pendampingan teknis. 5. Pemaparan Materi 5: Komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penguatan PSC 119 di Provinsi Papua Barat Daya. 6. Diskusi dan RTL/Rekomendasi.
Hasil Kegiatan	1. Kesepahaman bersama lintas instansi terkait penguatan sistem PSC 119.

	<p>2. Tersusunnya draft rencana tindak lanjut implementasi PSC 119 di Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p>2. Tersusunnya notulen Forum SHEK sebagai dasar pengusulan program PSC 119 dalam perencanaan dan penganggaran daerah (APBD).</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Kesepahaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun MoU/kesepahaman bersama lintas instansi terkait peran masing-masing dalam sistem PSC 119. • Menetapkan pihak penanggung jawab utama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. <p>2. Integrasi ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan program PSC 119 ke dalam RKPD dan APBD Provinsi Papua Barat Daya. • Menyusun anggaran operasional, pelatihan, serta infrastruktur digital pendukung PSC 119. <p>3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan platform komunikasi digital terpadu yang menghubungkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, BNPB, Diskominfo, dan Damkar. • Melaksanakan uji coba sistem PSC 119 di Kota Sorong sebagai pilot project sebelum diperluas ke kabupaten/kota lainnya. <p>4. Pelatihan dan Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan, aparat kepolisian, BNPB, dan Damkar terkait penggunaan PSC 119. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengakses layanan PSC 119 dalam kondisi darurat.

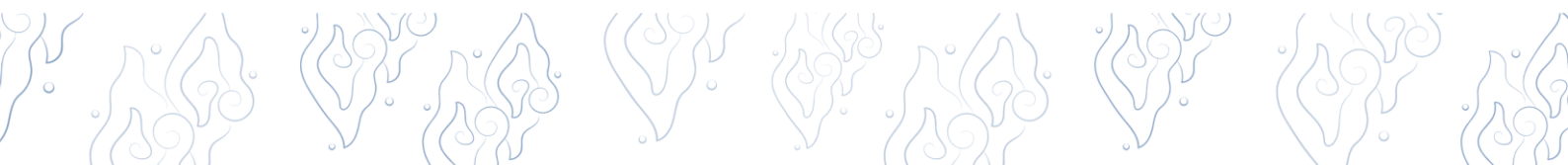
	<p>5. Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim monitoring lintas instansi untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PSC 119. • Menyusun laporan berkala (triwulan/semester) terkait capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan. <p>6. Kolaborasi Lintas Sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Kesehatan, BNPB, Polri, Diskominfo). • Mengintegrasikan PSC 119 dengan sistem nasional penanggulangan bencana dan layanan kesehatan darurat. <p>7. Target Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka kematian akibat keterlambatan penanganan kasus emergency. • Terbangunnya sistem PSC 119 yang solid, aplikatif, dan terintegrasi di Papua Barat Daya. • Peningkatan responsivitas pelayanan publik dalam kondisi darurat.
<p>Dokumentasi</p>	





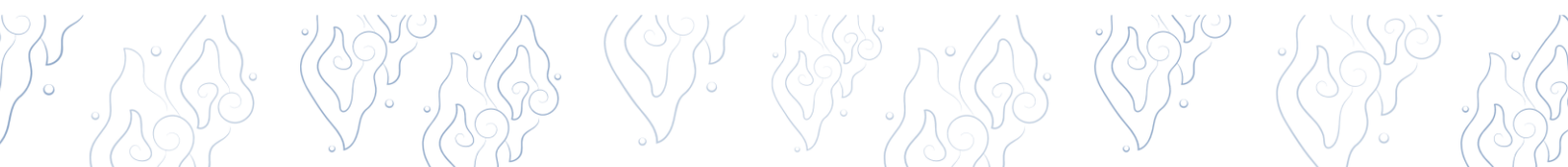
Kegiatan 6

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>SHEK BPP PBD bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong terkait Kepesertaan JKN pasca Perubahan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) di Papua Barat Daya</p>
-----------------------------	--

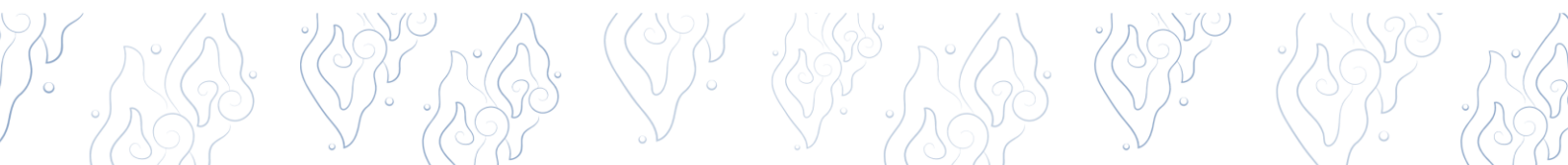


Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 13 Februari 2026 bertempat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong
Latar Belakang	Perubahan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) berdampak pada penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua Barat Daya. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah peserta PBI JKN yang sedang menjalani pengobatan mengalami kendala dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong serta dinas terkait guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait proses pengaktifan kembali status kepesertaan PBI JKN yang sebelumnya mengalami penonaktifan akibat perubahan data pada DTSN.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya 2. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sorong beserta jajaran
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan kepesertaan JKN di Papua Barat Daya.
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Poin-Poin Pembahasan	<p>1. Kota Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengaktifan kembali kepesertaan dilakukan sesuai alur dengan melengkapi persyaratan dan melapor ke Dinas Sosial Kota Sorong, sehingga kepesertaan dapat aktif kembali dalam waktu 1x24 jam. • Peserta nonaktif yang berada pada desil 6 ke atas diarahkan untuk menjadi peserta mandiri dan dapat langsung aktif.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif lain adalah pengalihan kepesertaan ke dalam skema Jamkesda. <p>2. Kabupaten Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kendala dalam proses penjaminan melalui Jamkesda akibat perubahan pada RKA, dari sebelumnya sebesar Rp6 miliar menjadi Rp5,1 miliar, yang diperkirakan hanya mencukupi hingga September atau Oktober 2026. <p>3. Kabupaten Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi relatif lebih sedikit karena jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan lebih kecil. <p>4. Hal-hal lain terkait penjaminan BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses klaim RSUD Waisai yang banyak mengalami klaim kedaluwarsa. • Potensi penurunan tipe rumah sakit pada RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan akibat ketersediaan tempat tidur yang belum memenuhi persyaratan (<100 tempat tidur). • Proses peningkatan kelas rumah sakit pada RS Pratama Tembrauw yang belum dilaksanakan sehingga kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum dapat dilakukan.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>1. Kota Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Papua Sehat akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Sosial Kota Sorong terkait proses pengaktifan kembali kepesertaan PBI JKN. <p>2. Kabupaten Sorong dan Kabupaten lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan koordinasi lanjutan terkait dukungan pendanaan Jamkesda dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC). <p>3. Hal-hal lain terkait penjaminan BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan evaluasi dan koordinasi lanjutan dengan RSUD Waisai Raja Ampat terkait kendala dalam proses klaim.



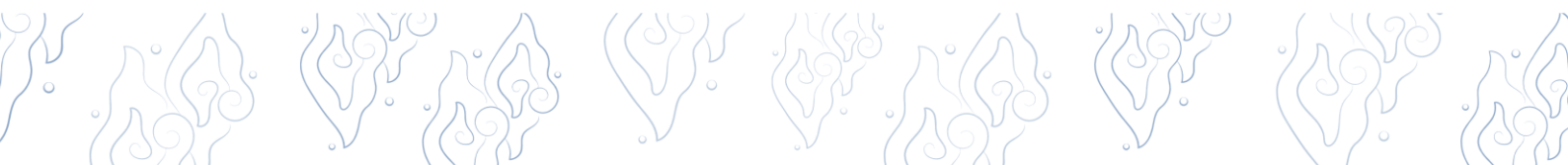
	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan evaluasi dan koordinasi terkait potensi penurunan tipe rumah sakit pada RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan akibat keterbatasan jumlah tempat tidur (<100 TT). • Dilakukan evaluasi dan koordinasi terkait proses peningkatan kelas RS Pratama Tambrauw yang belum dilaksanakan sehingga kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum dapat dilakukan.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi lanjutan dengan Dinas Sosial Kota Sorong terkait kendala pengaktifan kembali kepesertaan PBI JKN. 2. Melakukan koordinasi lanjutan terkait pendanaan Jamkesda dalam rangka mendukung Universal Health Coverage (UHC). 3. Melaksanakan evaluasi dan koordinasi lanjutan dengan RSUD Waisai Raja Ampat, RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan, serta RS Pratama Tambrauw terkait berbagai kendala dalam proses penjaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
<p>Dokumentasi</p>	



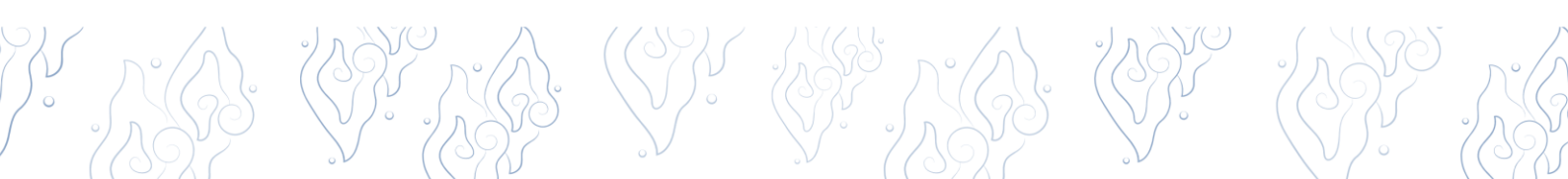
Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Audiensi BPP Papua Barat Daya bersama Yayasan Papua Lestari
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 13 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya dalam salah satu indikator kerjanya melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terkait penanganan penyakit malaria dan penyakit menular lainnya. Salah satu penyakit menular yang masih memerlukan perhatian khusus adalah HIV. Melalui audiensi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan, diharapkan dapat terbangun kolaborasi yang saling mendukung dalam upaya penanganan penyakit menular, khususnya HIV.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi melalui audiensi dengan LSM Yayasan Papua Lestari dan Yayasan Tifa Mandiri guna memperoleh masukan serta membangun kolaborasi yang saling mendukung dalam upaya penanganan penyakit menular, khususnya HIV.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Papua Sehat BPP Papua Barat Daya 2. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya 3. Yayasan Papua Lestari (Yapari) 4. Yayasan Tifa Mandiri (Yatima)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Sehat

<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan masing-masing LSM terkait profil yayasan, kegiatan yang dilaksanakan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. 2. Kegiatan utama dari kedua LSM berfokus pada upaya preventif, serta pemberdayaan ODHIV dan ODHA agar dapat hidup mandiri, berdaya, dan tidak mengalami stigma terhadap diri sendiri. 3. Kendala yang dihadapi di antaranya keterbatasan anggaran sehingga sumber daya manusia yang tersedia belum dapat bergerak secara optimal, serta adanya ketidaksinkronan data dengan instansi pemerintah terkait.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran LSM seperti Yayasan Papua Lestari (Yapari) dan Yayasan Tifa Mandiri (Yatima) yang terlibat langsung di lapangan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penjangkauan kasus serta pelaksanaan program penanganan HIV. 2. Kegiatan utama kedua LSM berfokus pada upaya preventif serta pemberdayaan ODHIV dan ODHA agar lebih mandiri dan tidak mengalami stigma terhadap diri sendiri. 3. Ditemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait keterbatasan anggaran serta ketidaksinkronan data dengan instansi pemerintah terkait.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi secara berkelanjutan dengan kedua LSM guna mendukung keberlangsungan program serta pencapaian indikator penanganan penyakit menular, khususnya HIV.</p>



Dokumentasi

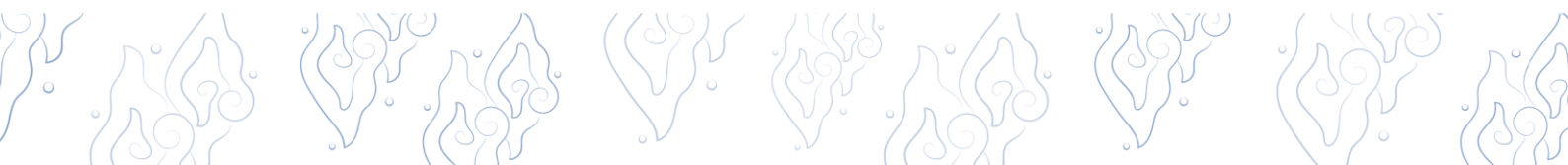


3.2 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Cerdas

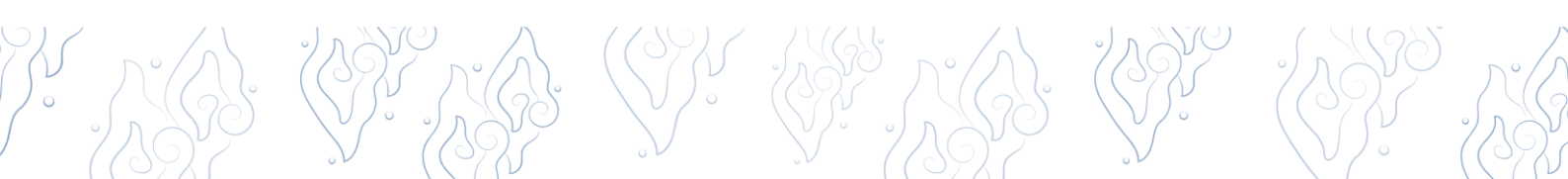
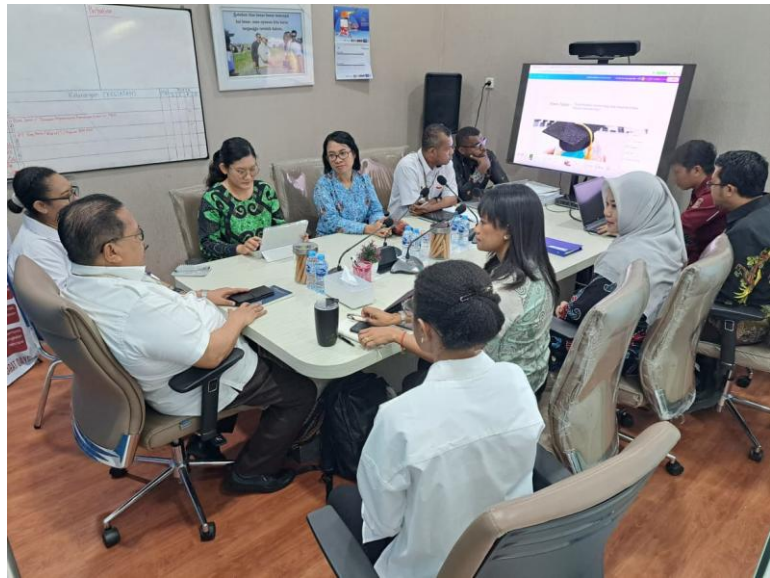
Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Audiensi BPP Papua Barat Daya bersama Mata Garuda Papua Barat Daya dalam rangka Penguatan Akses Beasiswa LPDP bagi Putra-Putri Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 4 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Papua Barat Daya. Mata Garuda sebagai organisasi alumni dan penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, pendampingan, serta motivasi bagi calon penerima beasiswa. Melalui audiensi ini diharapkan dapat terbangun komunikasi awal antara BPP Papua Barat Daya dan Mata Garuda Papua Barat Daya dalam rangka menjajaki peluang sinergi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan akses beasiswa LPDP bagi putra-putri Papua Barat Daya.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan Mata Garuda Papua Barat Daya. 2. Memperkenalkan peran dan program masing-masing pihak dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di Papua Barat Daya. 3. Menjajaki peluang kolaborasi dalam meningkatkan akses informasi dan pendampingan beasiswa LPDP bagi putra-putri Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya

	3. Pengurus Mata Garuda Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka penguatan akses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Papua Barat Daya.
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan Mata Garuda Papua Barat Daya. 2. Pemaparan peran Mata Garuda sebagai wadah alumni dan penerima beasiswa LPDP dalam mendukung pengembangan SDM. 3. Diskusi mengenai peluang peningkatan akses informasi beasiswa LPDP bagi putra-putri Papua Barat Daya. 4. Pembahasan potensi kolaborasi dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, serta penguatan kapasitas calon penerima beasiswa LPDP.
Hasil Kegiatan	Terjalannya komunikasi awal dan kesepahaman antara BPP Papua Barat Daya dan Mata Garuda Papua Barat Daya untuk membangun sinergi dalam mendorong peningkatan akses beasiswa LPDP bagi putra-putri Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	Mendorong kerja sama dan koordinasi lanjutan antara BPP Papua Barat Daya dan Mata Garuda Papua Barat Daya dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas calon penerima beasiswa LPDP di wilayah Papua Barat Daya.



Dokumentasi

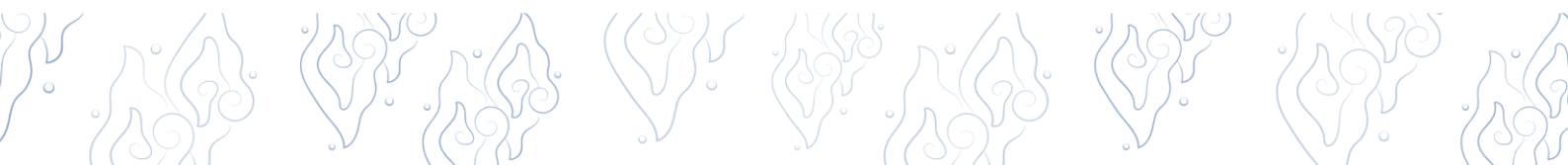


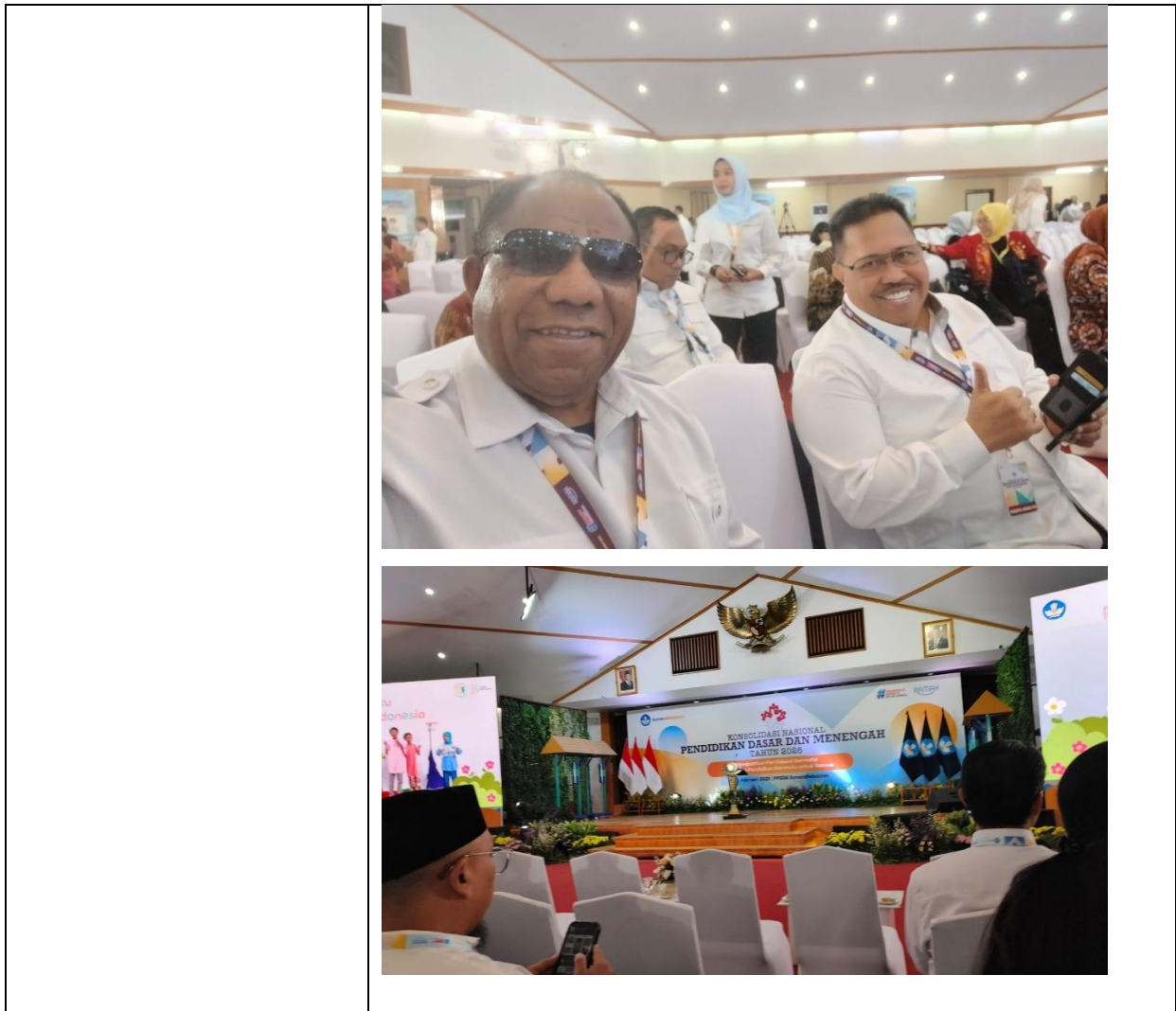
Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin–Rabu, 9–11 Februari 2026 bertempat di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Depok, Jawa Barat
Latar Belakang	<p>Dalam rangka penguatan kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Tahun 2026 yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan kompetensi guru. Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) pada sektor pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua melalui penguatan sistem pendidikan dasar dan menengah.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah terkait arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah. 2. Memperkuat koordinasi dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. 3. Mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional yang sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan dalam RIPPP/RAPPP di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perwakilan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota 4. Perwakilan instansi pendidikan terkait 5. BPP
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah.
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan nasional terkait tata kelola guru dan tenaga kependidikan, termasuk perencanaan kebutuhan guru, pengelolaan kinerja guru, serta peningkatan kualifikasi akademik guru hingga jenjang S1/D-IV. 2. Strategi penyelesaian tenaga guru non-ASN serta kebijakan pengangkatan PPPK guru di lingkungan pemerintah daerah. 3. Penguatan kualitas pembelajaran melalui konsep pembelajaran mendalam (deep learning) yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik serta pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran. 4. Implementasi pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan digital. 5. Program peningkatan kompetensi guru, termasuk penguatan numerasi melalui Gerakan Numerasi Nasional serta peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris dan matematika di sekolah dasar. 6. Peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program pendidikan nasional serta penyelarasan program tersebut dengan prioritas pembangunan pendidikan di Tanah Papua sebagaimana tercantum dalam RIPP dan RAPP.

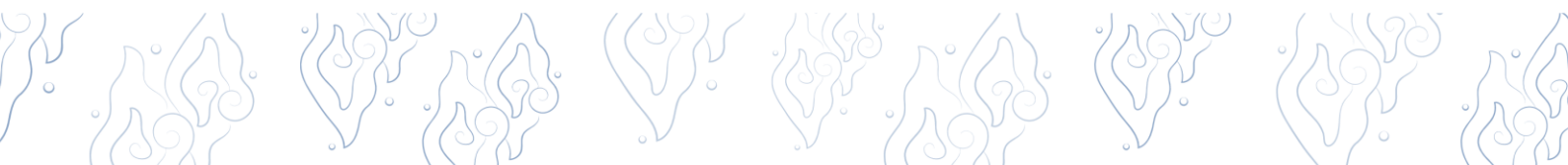
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai arah kebijakan nasional pembangunan pendidikan dasar dan menengah. 2. Teridentifikasinya peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program pendidikan nasional di daerah. 3. Terbangunnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan tata kelola guru serta peningkatan kualitas pembelajaran. 4. Teridentifikasinya peluang integrasi kebijakan pendidikan nasional dengan prioritas pembangunan pendidikan dalam kerangka RIPPP dan RAPP di wilayah Papua Barat Daya.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lanjutan dengan dinas pendidikan di daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan program pembangunan pendidikan di Papua Barat Daya. 2. Mendorong implementasi program peningkatan kompetensi guru serta penguatan numerasi dan literasi di satuan pendidikan. 3. Mengintegrasikan arah kebijakan pendidikan nasional dalam perencanaan program pembangunan pendidikan daerah yang sejalan dengan implementasi RIPPP dan RAPP di Tanah Papua.
<p>Dokumentasi</p>	





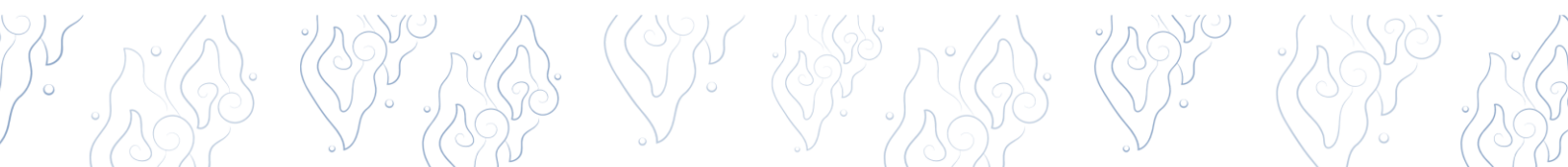
Kegiatan 3

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>SHEK BPP Papua Barat Daya bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw terkait Masterplan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Tambrauw</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Sabtu, 14 Februari 2026 bertempat di Kota Sorong</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu OPD teknis di Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi prioritas dalam pendampingan percepatan pembangunan pada sektor pendidikan dalam rangka mendukung Misi Papua Cerdas. Dalam upaya</p>



	meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat perencanaan pembangunan pendidikan di daerah, diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif melalui Masterplan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tambrauw yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan program percepatan pembangunan Papua sebagaimana tercantum dalam RAPPP 2025–2029.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan terhadap rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw Tahun 2026 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Tambrauw.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw 3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw 4. Kepala Bidang SMP 5. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 6. Pengawas Sekolah 7. Staf Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program pembangunan pendidikan antara pemerintah daerah dan BPP Papua Barat Daya.
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw menyampaikan rencana program yang akan dilaksanakan, antara lain penyusunan Masterplan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tambrauw, serta

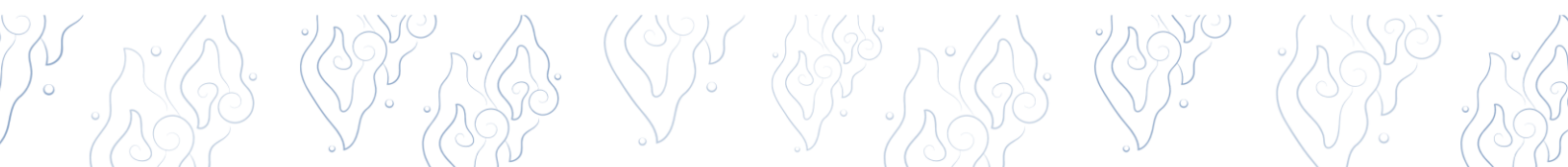
	<p>pengembangan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Sekolah Berasrama.</p> <p>2. Peran BPP dalam melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) serta pendampingan kepada pemerintah daerah agar program percepatan pembangunan yang tercantum dalam RAPPP 2025–2029 dapat diimplementasikan di Kabupaten Tambrau sesuai dengan lokus yang telah ditetapkan.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>1. Rencana penyusunan Masterplan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tambrau dinilai sebagai langkah strategis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang, dengan proyeksi hingga 20 tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menyinkronkan kebijakan RPJMD Kabupaten Tambrau, RAPPP, serta program nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>2. Program percepatan dalam RAPPP 2025–2029 di sektor pendidikan antara lain Sekolah Berasrama dan Sekolah Terbuka. Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dinilai dapat diterapkan di Kabupaten Tambrau dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah, sebagai upaya meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menekan angka putus sekolah.</p> <p>3. Optimalisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tambrau, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pendampingan Pokja Papua Cerdas bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.</p> <p>4. BPP Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas menyatakan komitmennya untuk mendampingi Kabupaten Tambrau sebagai salah satu wilayah</p>



	<p>prioritas percepatan pembangunan Misi Papua Cerdas, khususnya dalam peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan FKIP Universitas Papua (UNIPA) sebagai lembaga yang akan dilibatkan dalam penyusunan dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tambrauw. 2. Menunggu arahan untuk pelaksanaan diskusi lanjutan bersama Bupati Kabupaten Tambrauw terkait penyusunan masterplan dimaksud. 3. Melaksanakan pertemuan tindak lanjut bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw di Kabupaten Tambrauw guna memperdalam pembahasan rencana penyusunan dokumen tersebut.
<p>Dokumentasi</p>	

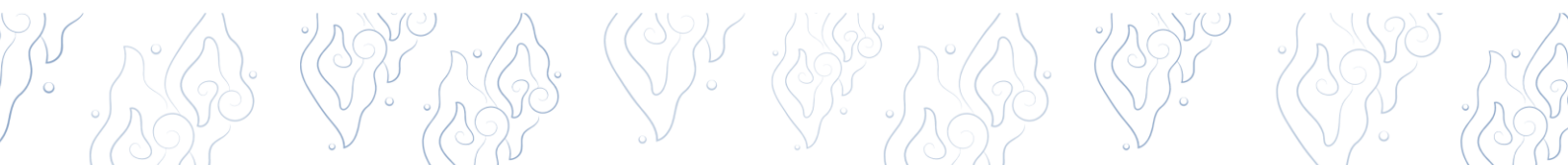
Kegiatan 4

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Pertemuan BPP Papua Barat Daya dengan Perwakilan Lembaga Pusat Penelitian Bahasa di Paris (Daniel) dalam rangka Penguatan Pelestarian Bahasa dan Budaya Lokal</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Selasa, 24 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya</p>

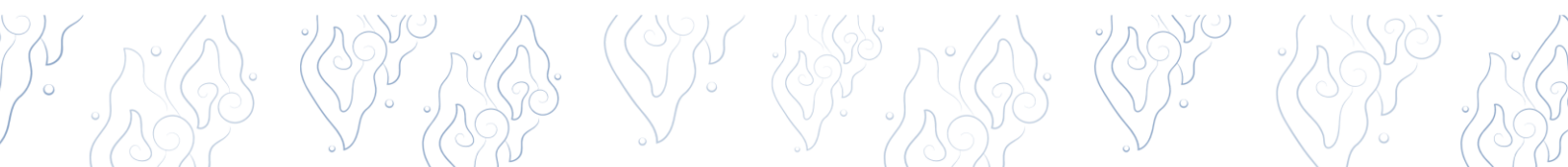


Latar Belakang	Daniel merupakan warga negara Jerman yang bekerja pada salah satu lembaga pusat penelitian bahasa di Paris. Kehadirannya di Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk melakukan kegiatan dokumentasi terhadap berbagai bahasa daerah di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa dan budaya lokal. Kegiatan pendokumentasian bahasa tersebut dipandang penting dalam mendukung pelestarian kekayaan budaya Papua sekaligus memperkuat identitas dan pengetahuan lokal masyarakat.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan pendokumentasian bahasa yang telah dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya sejak tahun 2025 serta menjajaki potensi sinergi dalam upaya pelestarian bahasa daerah di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Daniel (Peneliti bahasa) 3. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya 4. Bapak Marthen Nebore
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dalam rangka mendukung pelestarian bahasa dan budaya lokal di Papua Barat Daya.
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan kegiatan dokumentasi bahasa yang telah dilakukan di wilayah Papua Barat Daya. 2. Pembahasan arah kebijakan penguatan bahasa daerah dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya sebagaimana tercantum dalam RAPPP.
Hasil Kegiatan	1. Kegiatan pendokumentasian bahasa yang telah dilakukan meliputi bahasa Moi Kelim, bahasa Iwaro

	<p>(yang telah disusun dalam bentuk kamus), serta bahasa Bira yang saat ini sedang dalam proses dokumentasi pada tahun 2026. Hasil dokumentasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun peneliti asing diharapkan dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan dan dipublikasikan secara luas guna meningkatkan indeks bahasa di Indonesia, mengingat Provinsi Papua Barat Daya saat ini masih berada pada peringkat empat terbawah secara nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam rangka penguatan dokumentasi bahasa di Tanah Papua, direncanakan penyelenggaraan Konferensi Bahasa Seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2026 di Tanah Papua. Dalam kegiatan tersebut, Daniel diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait dalam merumuskan strategi pendokumentasian bahasa di Tanah Papua. 3. Pokja Papua Cerdas BPP Papua Barat Daya juga akan membantu memperoleh buku hasil dokumentasi Bahasa Kokoda yang disusun oleh Ibu Bodory sebagai bagian dari penguatan referensi bahasa daerah di wilayah Papua Barat Daya.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Melaksanakan koordinasi lanjutan dengan pihak peneliti serta instansi terkait dalam rangka mendukung kegiatan pendokumentasian dan pelestarian bahasa daerah di Provinsi Papua Barat Daya.</p>



Dokumentasi



3.3 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Produktif

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Penguatan Konektivitas Papua Barat Daya: SHEK BPP Papua Barat Daya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat terkait Penanganan serta Pengembangan Ruas Jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 2 Februari 2026 bertempat di Kantor BBPJN Papua Barat, Manokwari
Latar Belakang	<p>Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka akses wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi.</p> <p>Dalam kerangka percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), penguatan konektivitas antarwilayah menjadi agenda strategis.</p> <p>Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, khususnya dalam menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satu koridor konektivitas yang penting adalah ruas jalan Susumuk–Bintuni yang menghubungkan Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni, serta ruas</p>

	<p>jalan Mare–Fef yang menghubungkan Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Tambrau. Kedua ruas jalan tersebut memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas lintas provinsi, mendukung pengembangan wilayah hinterland terhadap pusat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat integrasi ekonomi regional antara Papua Barat Daya dan Papua Barat.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terkait penanganan dan pengembangan ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef. 2. Menyelaraskan kebijakan dan program infrastruktur jalan nasional antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. 3. Mendukung penguatan Papua Produktif melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sebagai kondisi perlu bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 4. Mengidentifikasi isu, kendala, dan kebutuhan strategis dalam penanganan ruas jalan nasional sebagai bahan rekomendasi kebijakan Badan Pengarah Papua. 5. Menjadi dasar penyusunan tindak lanjut kebijakan dan rekomendasi strategis terkait pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya 3. Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya 4. Staf Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<p>1. Kondisi Infrastruktur Jalan</p> <p>Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan yang belum sepenuhnya mantap. • Struktur jalan yang masih berupa tanah atau pengerasan sederhana. • Beberapa titik rawan longsor dan genangan air. • Keterbatasan jembatan dan sistem drainase. • Tantangan topografi wilayah pegunungan dan hutan. <p>2. Peran Strategis Ruas Jalan</p> <p>Kedua ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan Kabupaten Maybrat dengan wilayah pesisir dan kawasan industri Teluk Bintuni. • Mendukung akses masyarakat pedalaman menuju pusat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. • Membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis pangan lokal, peternakan, sagu, kakao, serta hasil hutan bukan kayu. • Mendukung integrasi konektivitas antara Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. <p>3. Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur</p> <p>Pentingnya sinkronisasi antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPJMN • RIPP dan RAPP Papua • RPJMD Provinsi Papua Barat Daya • RPJMD Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau.

	<p>Sinkronisasi ini diperlukan agar pembangunan ruas jalan dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional dan memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.</p> <p>4. Dukungan BPP Papua Barat Daya</p> <p>BPP Papua Barat Daya memiliki peran strategis dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. • Mengintegrasikan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. • Memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef memiliki nilai strategis tinggi dalam mendukung konektivitas wilayah serta percepatan pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya. 2. Diperlukan penanganan bertahap dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan agar ruas tersebut dapat berfungsi optimal sebagai jalur penghubung antarwilayah. 3. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPP Papua Barat Daya sangat diperlukan dalam mempercepat realisasi pembangunan ruas jalan tersebut. 4. Penguatan konektivitas wilayah diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap penurunan biaya logistik, peningkatan akses pasar bagi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian teknis lanjutan terhadap kondisi ruas jalan Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef sebagai dasar perencanaan pembangunan.

2. Mendorong peningkatan status prioritas ruas jalan dalam program pembangunan infrastruktur nasional melalui Kementerian PUPR.
3. Memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan BBPUN Papua Barat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan jalan.
4. Mengintegrasikan pembangunan ruas jalan dengan pengembangan klaster ekonomi regional, khususnya sektor pangan lokal, peternakan, dan komoditas unggulan Papua Barat Daya.
5. BPP Papua Barat Daya akan memfasilitasi komunikasi dan advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat guna mempercepat realisasi pembangunan konektivitas wilayah.

Dokumentasi



Kegiatan 2

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Pertemuan BPP Papua Barat Daya bersama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, DPRD Maybrat, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam rangka Penguatan Sinergi Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat Daya</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Selasa, 3 Februari 2026 bertempat di Km 10, Kota Sorong</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta membuka akses ekonomi bagi daerah-daerah yang selama ini masih mengalami keterisolasian.</p> <p>Kabupaten Maybrat sebagai wilayah pedalaman di Provinsi Papua Barat Daya memiliki tantangan geografis yang cukup besar, terutama dalam hal aksesibilitas jalan menuju wilayah lain di Tanah Papua. Oleh karena itu, penguatan konektivitas jalan strategis menjadi sangat penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat integrasi wilayah.</p> <p>Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta kebijakan percepatan pembangunan melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam memperkuat</p>

	<p>konektivitas wilayah dan mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.</p> <p>Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat di Manokwari, yang bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis di wilayah Papua Barat Daya.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPP Papua Barat Daya dalam pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya. 2. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Maybrat. 3. Mendorong percepatan penanganan ruas jalan strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah. 5. Menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur daerah dengan program pembangunan nasional melalui Kementerian PUPR. 6. Merumuskan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya 3. Staf Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya 4. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat 5. DPRD Provinsi Papua Barat Daya 6. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi dan koordinasi.</p>

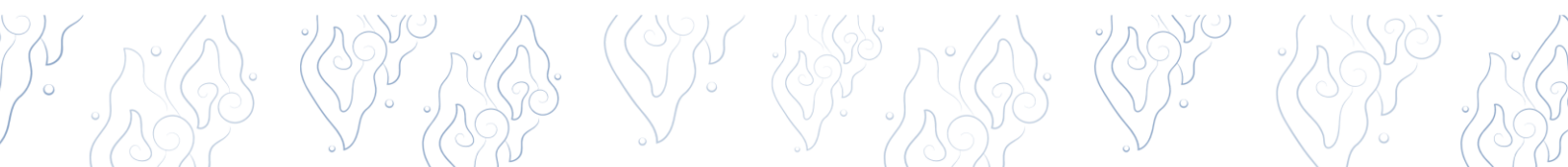
Misi/Keterangan	Papua Produktif
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<p>1. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Maybrat Peserta pertemuan membahas kondisi infrastruktur jalan yang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan yang belum mantap di beberapa ruas strategis. • Keterbatasan akses transportasi menuju distrik-distrik pedalaman. • Infrastruktur jembatan dan drainase yang masih perlu ditingkatkan. • Tantangan kondisi geografis berupa wilayah perbukitan dan hutan. <p>2. Ruas Jalan Strategis Penghubung Wilayah Pertemuan juga membahas pentingnya pengembangan beberapa ruas jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Maybrat dengan wilayah lain, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Susumuk – Bintuni yang menghubungkan Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni. • Ruas Mare – Fef yang menghubungkan Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Tambrauw. <p>Kedua ruas tersebut memiliki peran penting dalam membuka akses ekonomi serta mendukung pengembangan wilayah pedalaman.</p> <p>3. Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan infrastruktur daerah dengan program pembangunan nasional, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPJMN • RIPP dan RAPP Papua • RPJMD Provinsi Papua Barat Daya • RPJMD Kabupaten Maybrat. <p>4. Peran BPP Papua Barat Daya BPP Papua Barat Daya memiliki peran strategis dalam:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Tanah Papua. • Mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan Papua.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Maybrat merupakan kebutuhan strategis dalam membuka keterisolasian wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Ruas jalan Susumuk – Bintuni dan Mare – Fef menjadi prioritas dalam penguatan konektivitas antarwilayah di Papua Barat Daya. 3. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta BPP Papua Barat Daya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. 4. Penguatan konektivitas wilayah diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lanjutan antara BPP Papua Barat Daya, BBPJJN Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait rencana penanganan ruas jalan prioritas. 2. Mendorong penyusunan kajian teknis serta perencanaan pembangunan jalan sebagai dasar pengusulan program kepada pemerintah pusat. 3. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur jalan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal di wilayah Kabupaten Maybrat. 4. Memperkuat dukungan kebijakan dan penganggaran guna mempercepat pembangunan konektivitas wilayah di Papua Barat Daya.

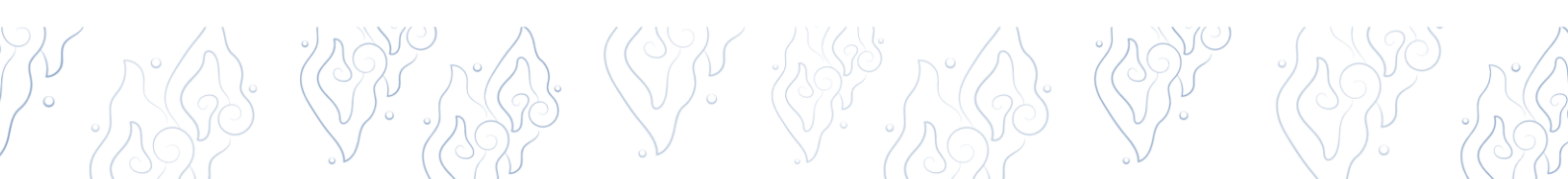
	<p>5. BPP Papua Barat Daya akan memfasilitasi advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

Kegiatan 3

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Koordinasi Lanjutan BPP Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait Pengembangan Ruas Jalan Strategis di Kabupaten Maybrat</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Selasa, 3 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Penguatan konektivitas wilayah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Maybrat sebagai wilayah pedalaman</p>

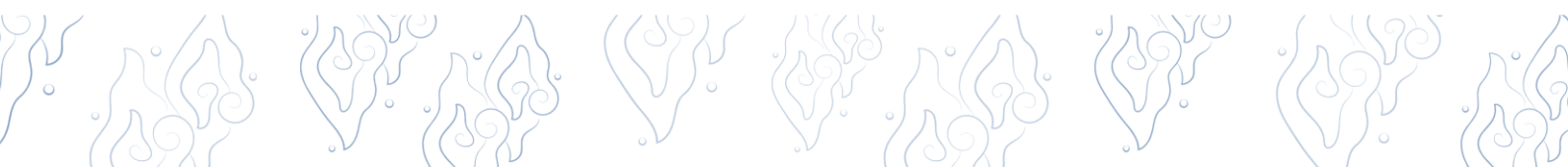


	<p>memiliki posisi strategis dalam pengembangan konektivitas antarwilayah, khususnya dalam menghubungkan daerah hinterland dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.</p> <p>Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Maybrat yang membutuhkan penanganan dan pengembangan lebih lanjut agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.</p> <p>Sejalan dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas penting dalam membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat konektivitas antarwilayah.</p> <p>Dalam rangka memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPP Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat melaksanakan koordinasi lanjutan guna membahas pengembangan ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Maybrat.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<p>1. Memperkuat komitmen dan sinergi antara BPP Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam pengembangan infrastruktur jalan strategis.</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengidentifikasi kebutuhan penanganan dan pengembangan ruas jalan prioritas di Kabupaten Maybrat. 3. Menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur daerah dengan program pembangunan nasional. 4. Mendorong percepatan pembangunan konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 5. Merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan ruas jalan yang dapat membuka akses wilayah pedalaman.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya 2. Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<p>1. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Maybrat</p> <p>Peserta pertemuan membahas kondisi infrastruktur jalan yang masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jalan yang belum sepenuhnya mantap pada beberapa ruas utama. • Keterbatasan akses transportasi menuju distrik-distrik pedalaman. • Infrastruktur pendukung seperti jembatan dan drainase yang masih terbatas. • Tantangan geografis berupa wilayah perbukitan, hutan, serta kondisi tanah yang rawan kerusakan jalan. <p>2. Identifikasi Ruas Jalan Strategis</p> <p>Pertemuan juga membahas beberapa ruas jalan yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah Kabupaten Maybrat, antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Susumuk – Bintuni sebagai jalur penghubung Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni. • Ruas Mare – Fef sebagai jalur penghubung Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Tambrauw. • Penguatan konektivitas antar distrik di wilayah Kabupaten Maybrat. <p>Ruas-ruas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses wilayah pedalaman serta mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal.</p> <p>3. Sinkronisasi Program Pembangunan</p> <p>Pertemuan menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPJMN • RIPP dan RAPP Papua • RPJMD Provinsi Papua Barat Daya • RPJMD Kabupaten Maybrat. <p>Sinkronisasi ini diperlukan agar pembangunan infrastruktur jalan dapat memperoleh dukungan kebijakan serta pendanaan dari pemerintah pusat.</p> <p>4. Dukungan Kelembagaan BPP Papua Barat Daya</p> <p>BPP Papua Barat Daya memiliki peran penting dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Tanah Papua melalui advokasi kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan.</p>
Hasil Kegiatan	<p>1. Pengembangan ruas jalan strategis di Kabupaten Maybrat merupakan kebutuhan penting dalam membuka keterisolasian wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.</p>



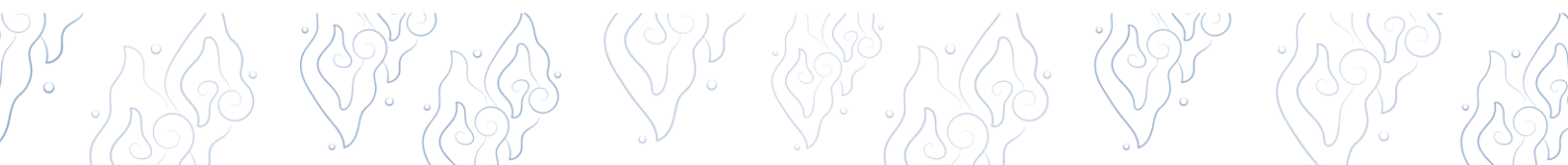
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ruas jalan Susumuk – Bintuni dan Mare – Fef menjadi prioritas dalam penguatan konektivitas antarwilayah. 3. Pemerintah Kabupaten Maybrat menyatakan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat. 4. Penguatan konektivitas wilayah diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lanjutan antara BPP Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Maybrat, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat terkait rencana pengembangan ruas jalan strategis. 2. Menyusun kajian teknis serta dokumen perencanaan pembangunan jalan sebagai dasar pengusulan program kepada pemerintah pusat. 3. Mengintegrasikan pembangunan ruas jalan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, peternakan, dan komoditas unggulan daerah. 4. Mendorong dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan konektivitas wilayah di Kabupaten Maybrat. 5. BPP Papua Barat Daya akan memfasilitasi advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur jalan strategis di wilayah Papua Barat Daya.





Kegiatan 4

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Audiensi BPP Papua Barat Daya bersama PT Gag Nikel dalam rangka Penguatan Peran Dunia Usaha bagi Pembangunan Papua Barat Daya</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Rabu, 4 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Keterlibatan sektor swasta merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Industri pertambangan sebagai salah satu sektor strategis diharapkan tidak hanya berkontribusi pada kegiatan ekonomi semata, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur di wilayah sekitar operasional perusahaan.</p> <p>Sejalan dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan bahwa</p>



	<p>kegiatan investasi dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.</p> <p>Dalam konteks tersebut, BPP Papua Barat Daya melaksanakan audiensi dengan PT Gag Nickel guna membahas penguatan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan wilayah serta pemberdayaan masyarakat di Papua Barat Daya melalui skema kemitraan yang berkelanjutan.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Gag Nickel selaras dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua dalam kerangka RIPP. 2. Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal asal Papua Barat Daya. 3. Mendorong kedisiplinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya 3. Manajemen PT Gag Nickel
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan koordinasi.
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kontribusi PT Gag Nickel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Papua Barat Daya. 2. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat di wilayah lingkaran tambang agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan percepatan pembangunan Papua.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Gag Nickel didorong untuk melaporkan secara berkala realisasi program CSR kepada BPP Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya monitoring

	<p>kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PT Gag Nickel didorong untuk mengadopsi program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai salah satu bentuk implementasi CSR dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat Daya. 3. Dilakukan identifikasi awal terkait kebutuhan regulasi daerah mengenai Pajak Alat Berat (PAB) sebagai dasar penguatan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan PAD.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Melakukan koordinasi lanjutan untuk pembentukan Tim Teknis bersama yang melibatkan PT Gag Nickel, BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna memantau progres pelaksanaan program CSR serta penyusunan drafting regulasi terkait optimalisasi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

Kegiatan 5

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>SHEK dan Pendampingan BPP Papua Barat Daya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong Selatan dalam Audiensi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Rabu, 18 Februari 2026 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Penguatan pemanfaatan ruang kawasan hutan secara berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah di Tanah Papua. Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun pengembangannya perlu tetap memperhatikan aspek tata kelola kawasan hutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p> <p>Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua serta arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka memastikan pemanfaatan kawasan hutan dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.</p> <p>Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan audiensi dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI untuk membahas rencana penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan infrastruktur akses</p>

	masyarakat serta pengembangan kegiatan ekonomi daerah. BPP Papua Barat Daya turut melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses audiensi tersebut.
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan Kementerian Kehutanan RI terkait rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan daerah. 2. Mendukung percepatan penyelesaian perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan akses jalan bagi masyarakat. 3. Mendorong sinergi program pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan kebijakan tata kelola kawasan hutan nasional.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI 2. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 3. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 4. Anggota BPP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi (SHEK) serta pendampingan pemerintah daerah dalam proses audiensi dengan pemerintah pusat.
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan surat Bupati Sorong Selatan terkait permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan akses bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. 2. Pembahasan mekanisme kebijakan pemanfaatan kawasan hutan yang dapat mendukung pembangunan wilayah serta pengembangan ekonomi lokal di Provinsi Papua Barat Daya.

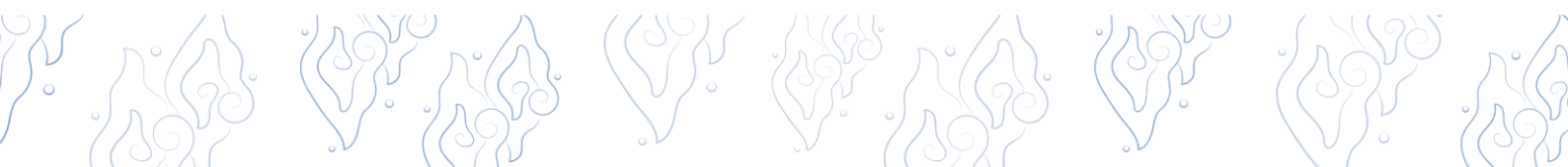
	<p>3. Pembahasan potensi pengembangan program pembangunan ekonomi daerah yang dapat dilaksanakan di wilayah Sorong Selatan dengan tetap memperhatikan regulasi kehutanan.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI menerima audiensi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. 2. Kabupaten Sorong Selatan mendapatkan alokasi program cetak sawah pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah. 3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memberikan dukungan terhadap revitalisasi pabrik milik Perhutani di Kabupaten Sorong Selatan, sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi lanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan Kementerian Kehutanan RI terkait proses pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan daerah. 2. Mendorong Pemda Sorong Selatan untuk menyusun langkah teknis terkait pelaksanaan program cetak sawah tahun 2027 di Kabupaten Sorong Selatan. 3. Mengkaji rencana revitalisasi pabrik milik Perhutani di Kabupaten Sorong Selatan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor kehutanan dan agroindustri. 4. BPP Papua Barat Daya melalui fungsi SHEK akan terus memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mempercepat

	realisasi program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

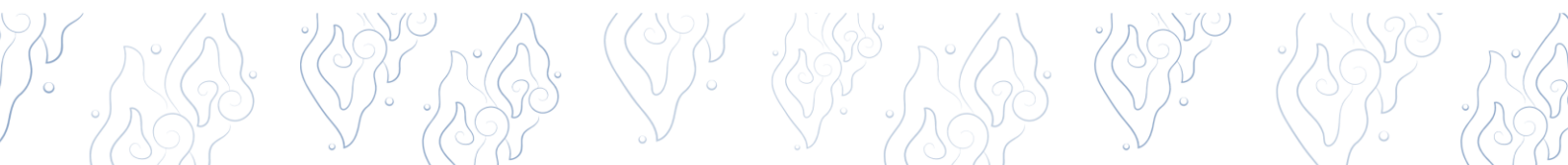
3.4 Pelaksanaan SHEK Misi Papua Polhukam (Damai)

Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Partisipasi BPP Papua Barat Daya pada Syukuran 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 20 Februari 2026 bertempat di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, Kota Sorong
Latar Belakang	Momentum satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya menjadi kesempatan penting untuk melakukan refleksi atas berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan agenda pembangunan daerah ke depan. Sebagai provinsi daerah otonomi baru, Papua Barat Daya terus berupaya



	<p>mempercepat pembangunan di berbagai sektor, baik pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>Kegiatan syukuran satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya menjadi forum kebersamaan antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempererat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>Dalam konteks percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta arah kebijakan pembangunan Papua melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, BPP Papua Barat Daya turut menghadiri kegiatan Syukuran 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan daerah serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. 2. Memperkuat sinergi antara BPP Papua Barat Daya dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah. 4. Mendukung kolaborasi lintas lembaga dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua Barat Daya. 5. Mendorong penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya 2. Kepala OPD dan staf terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya 3. Tokoh masyarakat dan masyarakat umum
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Partisipasi dan dukungan kelembagaan dalam kegiatan syukuran dan ibadah sebagai bagian dari penguatan sinergi pembangunan daerah.
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Disampaikan berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya selama satu tahun kepemimpinan, termasuk upaya penguatan kelembagaan pemerintahan provinsi serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Komitmen Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, khususnya pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. 3. Penguatan Sinergi Antar Lembaga Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga

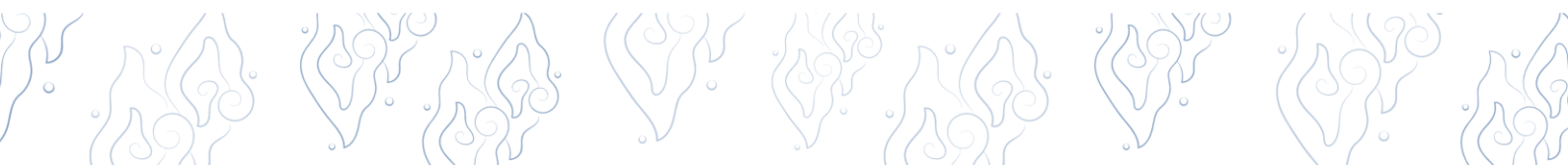
	<p>pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah di Papua Barat Daya.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Momentum satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah. 2. Kehadiran BPP Papua Barat Daya merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan daerah serta upaya memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan. 3. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai lembaga terkait menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya. 4. Pembangunan Papua Barat Daya diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program percepatan pembangunan daerah. 2. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. 3. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. 4. Memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan. 5. Mendukung berbagai program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.



Kegiatan 2

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Partisipasi BPP Papua Barat Daya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sorong</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Sabtu, 28 Februari 2026 bertempat di Kantor Walikota Sorong</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sorong merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merefleksikan perjalanan pembangunan kota sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang. Sebagai salah satu kota strategis di wilayah Papua Barat Daya, Kota Sorong memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat.</p> <p>Momentum peringatan HUT Kota Sorong juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat sinergi pembangunan daerah.</p> <p>Dalam konteks percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang</p>

	<p>Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), penguatan stabilitas sosial dan harmonisasi antar lembaga menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, BPP Papua Barat Daya turut berpartisipasi dalam kegiatan peringatan HUT Kota Sorong sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah serta upaya memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan terhadap Pemerintah Kota Sorong dalam momentum peringatan HUT Kota Sorong. 2. Memperkuat sinergi antara BPP Papua Barat Daya dengan Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. 3. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan di Kota Sorong. 4. Mendukung penguatan stabilitas sosial dan hubungan kelembagaan yang kondusif bagi pembangunan daerah.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Sorong 2. Anggota BPP Papua Barat Daya 3. Perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat Daya 5. Unsur Forkopimda 6. Tokoh masyarakat dan masyarakat Kota Sorong



Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Partisipasi kelembagaan dalam rangka mendukung penguatan sinergi pemerintah daerah serta stabilitas sosial masyarakat.
Misi/Keterangan	Papua Damai
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refleksi perjalanan pembangunan Kota Sorong serta capaian pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Sorong. 2. Penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. 3. Pentingnya menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan harmoni masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah. 4. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kota Sorong.
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnnya hubungan dan komunikasi yang baik antara BPP Papua Barat Daya dengan Pemerintah Kota Sorong serta berbagai pemangku kepentingan daerah. 2. Terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung pembangunan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya. 3. Momentum peringatan HUT Kota Sorong menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung program percepatan pembangunan daerah.

2. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua.
3. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam mendukung sinergi antar lembaga guna menciptakan stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sorong.

Dokumentasi





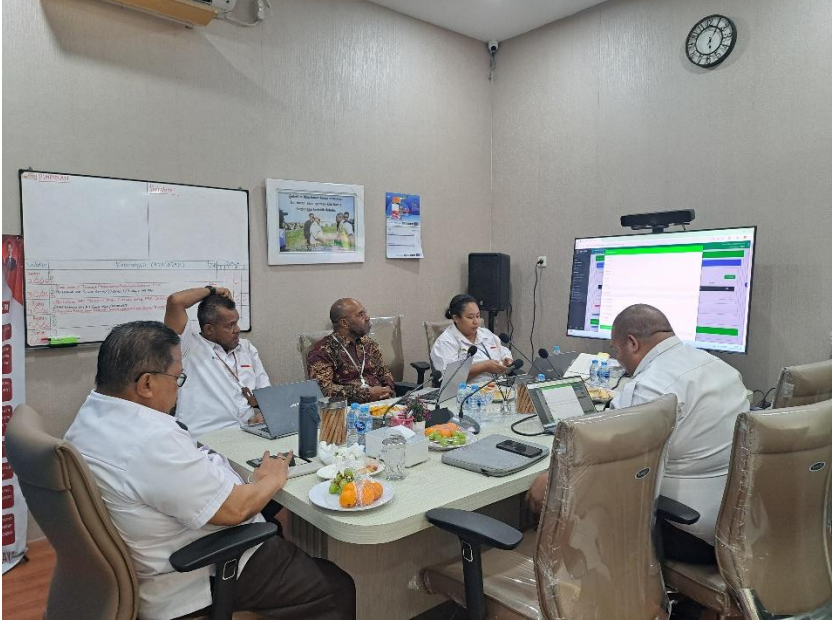
3.5 Pelaksanaan SHEK Strategis (Gabungan Misi)

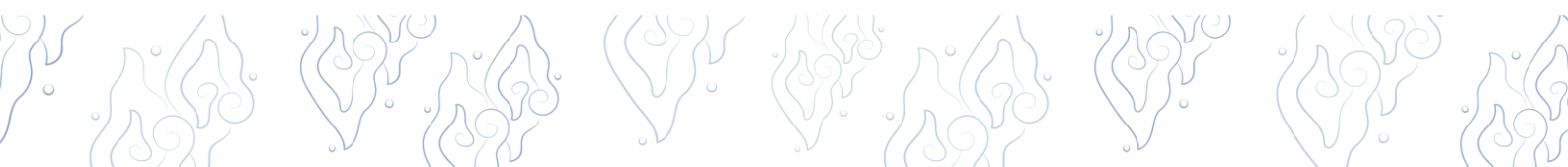
Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Pertemuan BPP Papua Barat Daya bersama Bappeda Kabupaten Maybrat dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 4 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konteks percepatan pembangunan di Tanah Papua, sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.</p> <p>Kabupaten Maybrat sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi pembangunan yang cukup besar, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, pangan lokal, serta pengembangan konektivitas wilayah. Namun demikian, tantangan pembangunan masih cukup signifikan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, serta penguatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah.</p>

	<p>Sejalan dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), diperlukan sinkronisasi yang kuat antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, BPP Papua Barat Daya bersama Bappeda Kabupaten Maybrat melaksanakan pertemuan koordinasi guna melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan Bappeda Kabupaten Maybrat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Menyelaraskan perencanaan pembangunan Kabupaten Maybrat dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua. 3. Mengidentifikasi program prioritas pembangunan daerah yang dapat didorong melalui kebijakan percepatan pembangunan Papua. 4. Mendorong integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. 5. Memperkuat dukungan kebijakan terhadap program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya 2. Staf Bappeda Kabupaten Maybrat
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi dan Koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>RIPPP (seluruh misi)</p>

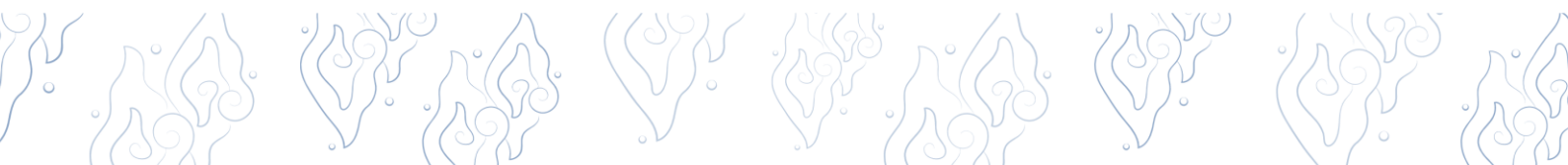
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<p>1. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan antara RPJMN, RIPP dan RAPP Papua, RPJMD Provinsi Papua Barat Daya, serta RPJMD Kabupaten Maybrat.</p> <p>2. Identifikasi sektor prioritas pembangunan Kabupaten Maybrat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah. • Pengembangan ekonomi berbasis pangan lokal dan peternakan. • Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. • Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan koperasi. <p>3. Integrasi program pembangunan daerah dengan agenda percepatan pembangunan Papua yang mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta penguatan konektivitas wilayah.</p> <p>4. Peran BPP Papua Barat Daya dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong integrasi kebijakan percepatan pembangunan Papua dengan program pembangunan daerah.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan program pembangunan di Kabupaten Maybrat selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Bappeda menyatakan komitmen untuk memperkuat integrasi program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.</p> <p>3. Teridentifikasinya sektor prioritas pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian, antara lain pembangunan infrastruktur konektivitas, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.</p>

	<p>4. Peran BPP Papua Barat Daya dinilai penting dalam memfasilitasi koordinasi serta advokasi kebijakan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lanjutan antara BPP Papua Barat Daya dan Bappeda Kabupaten Maybrat dalam rangka pemetaan program prioritas pembangunan daerah. 2. Menyusun integrasi program pembangunan daerah dengan agenda percepatan pembangunan Papua. 3. Mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pembangunan prioritas. 4. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam mengawal implementasi program percepatan pembangunan di Kabupaten Maybrat. 5. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih intensif guna memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
<p>Dokumentasi</p>	



Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam Rapat Pra-Rakortekrenbang Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 5 Februari 2026 secara daring melalui Zoom Meetings
Latar Belakang	<p>Dalam rangka memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>Sebelum pelaksanaan Rakortekrenbang, dilaksanakan Pra-Rakortekrenbang yang bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi usulan program daerah yang akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>Sejalan dengan mandat percepatan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta kebijakan percepatan pembangunan melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam forum perencanaan pembangunan nasional menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan nasional.</p>



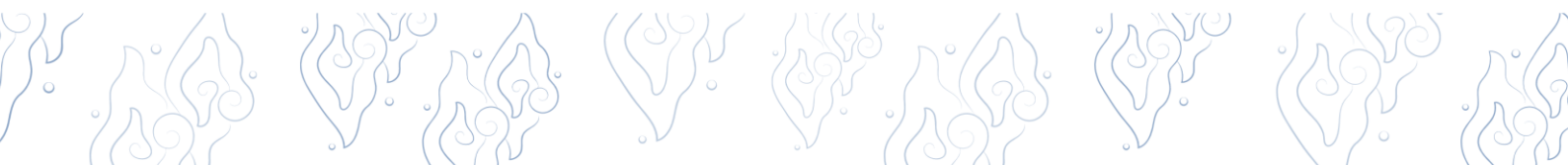
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Mengidentifikasi isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional. 2. Menyampaikan dan mengawal kebutuhan pembangunan wilayah Papua Barat Daya dalam forum perencanaan pembangunan nasional. 3. Mendorong integrasi program percepatan pembangunan Papua dengan program pembangunan nasional. 4. Memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya 2. Kemendagri 3. Bappenas 4. Bapperida PBD 5. Lainnya
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi dan Koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>RIPPP (seluruh misi)</p>
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional – Pembahasan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 yang mencakup penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. 2. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah – Pra-Rakortekrenbang menjadi wadah untuk menyelaraskan program pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah sehingga program yang

	<p>diusulkan daerah dapat terintegrasi dengan program nasional.</p> <p>3. Isu Strategis Pembangunan Wilayah – Pembahasan berbagai isu strategis daerah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur dasar. • Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. • Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. • Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. <p>4. Dukungan terhadap Percepatan Pembangunan Papua – Penekanan pada pentingnya dukungan program pembangunan nasional yang selaras dengan agenda percepatan pembangunan Papua yang mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta penguatan konektivitas wilayah.</p>
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra-Rakortekrenbang menjadi forum penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Partisipasi BPP Papua Barat Daya memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat. 3. Sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah dinilai penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. <p>2. Dukungan kebijakan dan program pembangunan nasional sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan memetakan program prioritas pembangunan Papua Barat Daya yang perlu

	<p>diusulkan dalam forum perencanaan pembangunan nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memperkuat koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dengan pemerintah daerah dalam penyusunan usulan program pembangunan. 3. Mendorong integrasi program percepatan pembangunan Papua dalam perencanaan pembangunan nasional. 4. Mengawal usulan program prioritas daerah agar dapat terakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat. 5. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
Dokumentasi	-

Kegiatan 3

Nama Kegiatan	SHEK BPP Papua Barat Daya bersama Bappenas terkait Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 6 Februari 2026 bertempat di Kantor Bappenas, Jakarta
Latar Belakang	Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat melalui Bappenas mengembangkan berbagai instrumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan interoperabilitas sistem perencanaan pembangunan melalui integrasi beberapa sistem perencanaan dan penganggaran daerah.



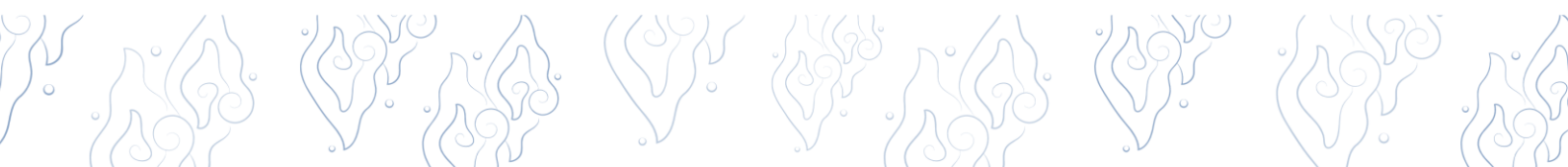
	<p>BPP Papua Barat Daya melaksanakan pertemuan dengan Bappenas guna memperjelas proses pelaksanaan interoperabilitas tiga sistem perencanaan, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), SIPPP (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua), dan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah). Integrasi sistem ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).</p> <p>Selain itu, BPP Papua Barat Daya juga melakukan koordinasi terkait progres penyusunan serta penginputan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra OPD di wilayah Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum seluruhnya terinput dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sinkronisasi terkait interoperabilitas tiga sistem perencanaan pembangunan yaitu SIPD, SIPPP, dan SIKD. 2. Melakukan koordinasi terkait progres penyusunan dan penginputan RPJMD kabupaten/kota serta Provinsi Papua Barat Daya. 3. Memastikan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan percepatan pembangunan Papua.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya 3. Tim Kerja Bappenas
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK)</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>RIPPP (seluruh misi)</p>

<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait proses pelaksanaan interoperabilitas tiga sistem perencanaan, yaitu SIPD, SIPPP, dan SIKD yang akan diterapkan untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua. 2. Koordinasi terkait kondisi beberapa daerah di Provinsi Papua Barat Daya yang belum melakukan penginputan dokumen RPJMD maupun Renstra OPD dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 3. Diskusi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan integrasi sistem perencanaan pembangunan tersebut.
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappenas dan BPP Papua Barat Daya sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan integrasi sistem perencanaan pembangunan melalui interoperabilitas SIPD, SIPPP, dan SIKD. 2. Teridentifikasi perlunya percepatan proses penginputan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra OPD di wilayah Papua Barat Daya. 3. Disepakati bahwa akan segera dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna memperkuat pemahaman pemerintah daerah terkait implementasi sistem interoperabilitas tersebut.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi terkait interoperabilitas sistem SIPD, SIPPP, dan SIKD kepada pemerintah daerah di wilayah Papua Barat Daya. 2. Mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penginputan dokumen RPJMD dan

	<p>Renstra OPD ke dalam sistem perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi lanjutan antara BPP Papua Barat Daya, Bappenas, dan pemerintah daerah guna memastikan integrasi sistem perencanaan pembangunan berjalan dengan baik.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

Kegiatan 4

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam Seminar dan Dialog Pembangunan Papua</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Selasa, 10 Februari 2026 bertempat di Amban, Manokwari</p>



Latar Belakang	<p>Pembangunan di Tanah Papua tidak dapat dipahami semata sebagai agenda pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai proses historis yang harus menjembatani mandat negara, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekologis. Otonomi Khusus Papua memberikan kerangka konstitusional yang unik, yaitu mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus melindungi identitas sosial, budaya, dan ruang hidup masyarakat adat.</p> <p>Dalam konteks percepatan pembangunan, integrasi strategis antarprovinsi di Tanah Papua menjadi kebutuhan penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih perencanaan pembangunan. Forum dialog pembangunan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sarana penting untuk menyamakan perspektif serta merumuskan arah pembangunan Papua yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat.</p> <p>Sejalan dengan mandat percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam forum seminar dan dialog pembangunan Papua menjadi penting untuk memastikan bahwa berbagai perspektif pembangunan daerah dapat terakomodasi dalam perumusan kebijakan pembangunan di Tanah Papua.</p>
-----------------------	---



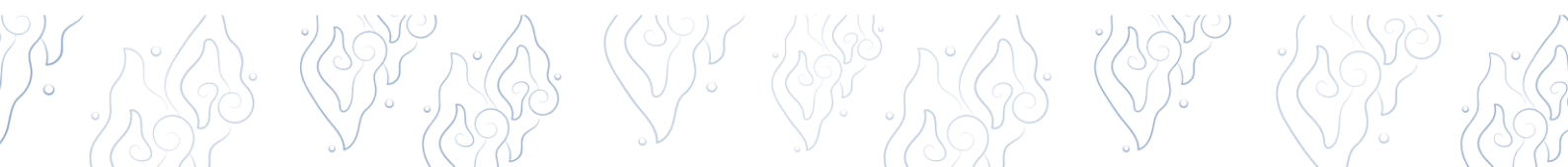
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti diskusi strategis terkait arah pembangunan Papua. 2. Menyampaikan perspektif dan kebutuhan pembangunan wilayah Papua Barat Daya. 3. Memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Papua. 5. Mengidentifikasi isu strategis dan peluang pengembangan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. 6. Mendukung integrasi kebijakan percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor pembangunan.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPP se-Tanah Papua 2. Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua 3. Gubernur atau perwakilan gubernur se-Tanah Papua 4. Lainnya
<p>Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan</p>	<p>Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK)</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>RIPPP (seluruh misi)</p>
<p>Poin-Poin Pembahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia – Pembahasan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan Papua. 2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal – Diskusi menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua, seperti sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengembangan UMKM. 3. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah – Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan

	<p>telekomunikasi dinilai penting dalam mempercepat pembangunan wilayah Papua serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.</p> <p>4. Penguatan Tata Kelola Pembangunan – Diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Tanah Papua.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar dan dialog pembangunan Papua menjadi forum penting dalam memperkuat pertukaran gagasan serta sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan di Tanah Papua. 2. Partisipasi BPP Papua Barat Daya memberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif pembangunan daerah serta mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi pembangunan. 3. Penguatan pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi agenda prioritas dalam pembangunan Papua. 4. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan hasil diskusi seminar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah. 2. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dalam mendukung pembangunan Papua. 3. Mendorong pengembangan program pembangunan berbasis potensi lokal di wilayah Papua Barat Daya.

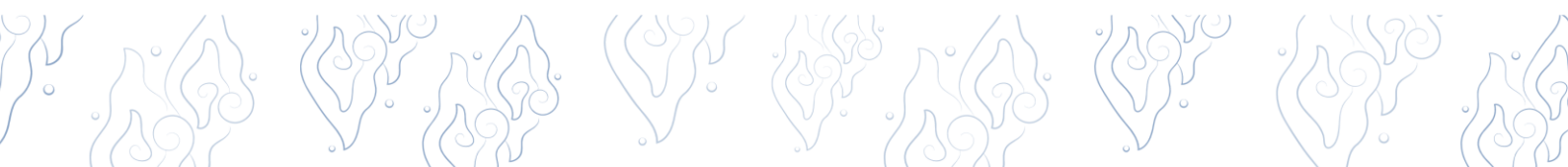
	<p>4. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam memfasilitasi koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan.</p> <p>5. Mengembangkan forum dialog pembangunan yang berkelanjutan guna memperkuat partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan Papua.</p>
<p>Dokumentasi</p>	 <p>Kecamatan Manokwari Barat Papua Barat 10 Feb 2026, 11:28</p>  <p>Manokwari Barat Papua Barat 10 Feb 2026, 11:29</p>

Kegiatan 5

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Pelayanan Kolaborasi Kemenkeu Satu Papua Tahun 2026</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>Rabu, 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Papua</p>
<p>Latar Belakang</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi antar unit kerja di</p>

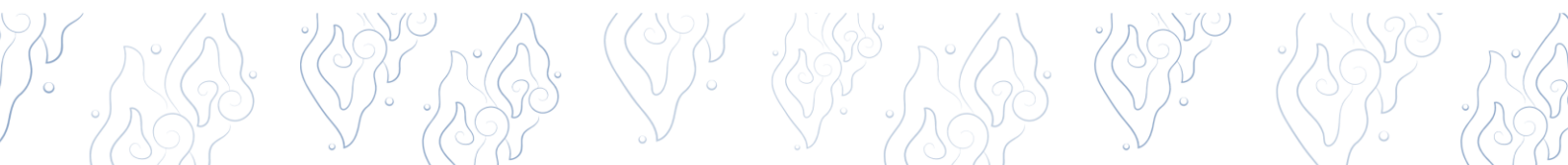



	<p>lingkungan Kementerian Keuangan, program Kemenkeu Satu terus dikembangkan sebagai upaya integrasi layanan dan edukasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja Kementerian Keuangan serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Di wilayah Papua, implementasi program Kemenkeu Satu memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan peredaran barang.</p> <p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Sejalan dengan upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam kegiatan ini menjadi penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan daerah.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<p>1. Mendukung peningkatan edukasi masyarakat terkait kebijakan kepabeanan dan cukai.</p>



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPP Papua Barat Daya, dan unit kerja Kementerian Keuangan di wilayah Papua. 3. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap peran kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan daerah. 4. Mendorong kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan aktivitas perdagangan. 5. Mendukung penguatan tata kelola ekonomi daerah melalui integrasi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya 2. Staf Kementerian Keuangan/KPPN Sorong 3. Perwakilan Bea Cukai Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Sinergitas
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kolaborasi Kemenkeu Satu Papua – Penjelasan mengenai pentingnya kolaborasi antar unit kerja Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan publik yang terintegrasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. 2. Edukasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pemaparan mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur ekspor dan impor barang • Pengawasan peredaran barang kena cukai • Peran Bea dan Cukai dalam mendukung perdagangan yang legal dan tertib. 3. Peran Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Daerah – Diskusi mengenai kontribusi kebijakan fiskal,

	<p>termasuk penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>4. Penguatan Sinergi Antar Lembaga – Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Papua.</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan edukasi dan pelayanan kolaborasi Kemenkeu Satu Papua menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan fiskal dan kepabeanan. 2. Partisipasi BPP Papua Barat Daya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan unit kerja Kementerian Keuangan di wilayah Papua. 3. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting dalam mendukung penguatan tata kelola ekonomi daerah. 4. Edukasi terkait kebijakan kepabeanan dan cukai diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan unit kerja Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan daerah. 2. Mendorong peningkatan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan kepabeanan dan cukai. 3. Mengembangkan forum kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan pelayanan publik. 4. Mendorong integrasi kebijakan fiskal dengan program pembangunan daerah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah.



	5. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam memfasilitasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Evaluasi dan Koordinasi Keterlambatan Penyaluran APBD Tahun 2026 Kabupaten Sorong Selatan bersama Bupati Sorong Selatan dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 23 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan tepat waktu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

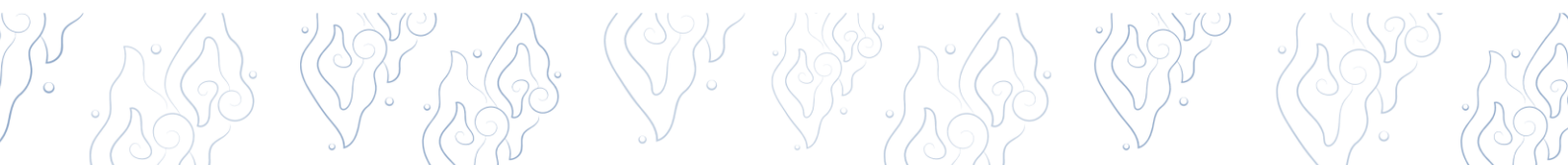
	<p>Dalam konteks percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta lembaga terkait menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Sehubungan dengan adanya keterlambatan dalam proses penyaluran APBD Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sorong Selatan, BPP Papua Barat Daya memfasilitasi pertemuan evaluasi dan koordinasi bersama Bupati Sorong Selatan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Daya guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan penyelesaian permasalahan tersebut.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyaluran APBD Tahun 2026 di Kabupaten Sorong Selatan. 2. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan BPP Papua Barat Daya dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan daerah. 3. Mendorong percepatan proses administrasi dan teknis yang berkaitan dengan penyaluran APBD. 4. Memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sorong Selatan.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota dan Pokja BPP Papua Barat Daya 2. Bupati Sorong Selatan 3. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Daya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) serta Binwas
Misi/Keterangan	RIPPP (seluruh misi)
Poin-Poin Pembahasan	<p>Dalam pertemuan tersebut dilakukan evaluasi terhadap kondisi keterlambatan penyaluran APBD Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala administratif dan teknis yang mempengaruhi proses penyaluran anggaran daerah. Diskusi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPP Papua Barat Daya dalam pertemuan ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pembangunan daerah dengan memberikan arahan terkait pentingnya percepatan penyelesaian proses administrasi serta memastikan bahwa keterlambatan penyaluran APBD tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.</p>
Hasil Kegiatan	<p>Berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi yang dilakukan, teridentifikasi beberapa kendala administratif dan teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran APBD Tahun 2026 di Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan dalam penyelesaian proses administrasi yang diperlukan. Dalam kegiatan ini, BPP Papua Barat Daya juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi serta</p>

	<p>memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>BPP Papua Barat Daya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera melakukan percepatan penyelesaian kendala administratif dan teknis yang berkaitan dengan penyaluran APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPP Papua Barat Daya juga akan terus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah agar proses penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sorong Selatan.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

Kegiatan 7

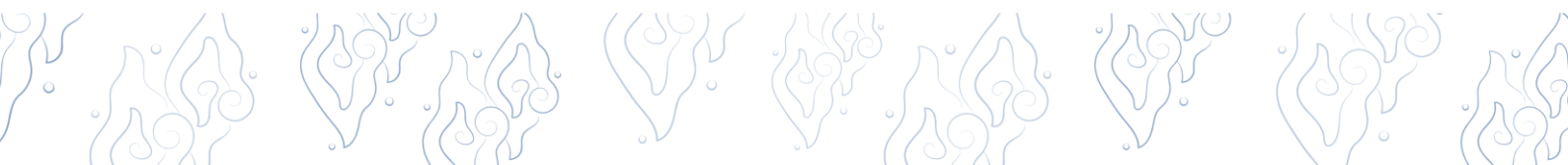
Nama Kegiatan	Koordinasi dan Penguatan Sinergi Kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan Badan Intelijen Negara (BIN) Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 24 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	<p>Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk di wilayah Papua. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) tidak terlepas dari kemitraan dengan berbagai lembaga negara dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas wilayah.</p> <p>Percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya memerlukan dukungan stabilitas keamanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta koordinasi yang baik antar lembaga negara. Stabilitas wilayah menjadi faktor penting yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan daerah.</p> <p>Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya.</p>



	<p>Dalam konteks tersebut, BPP Papua Barat Daya bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan sinergi kelembagaan guna memperkuat komunikasi, pertukaran informasi, serta kolaborasi antar lembaga dalam mendukung stabilitas wilayah dan percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sinkronisasi program antara BPP Papua Barat Daya dan BIN Papua Barat Daya. 2. Melaksanakan koordinasi terkait tugas dan fungsi kedua lembaga. 3. Menerima kunjungan Kepala BIN Papua Barat Daya yang baru bertugas di Provinsi Papua Barat Daya. 4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dan BIN Papua Barat Daya. 5. Mendorong penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. 6. Mengidentifikasi berbagai isu strategis yang berpotensi mempengaruhi stabilitas wilayah dan pembangunan daerah. 7. Mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman, stabil, dan kondusif bagi pelaksanaan program pembangunan. 8. Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya.
<p>Peserta Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Papua Barat Daya 3. Anggota Pokja Papua Sehat 4. Anggota Pokja Papua Cerdas Anggota Pokja Papua Produktif

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi (SHEK).
Misi/Keterangan	RIPPP (seluruh misi)
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan tim Pokja BPP Papua Barat Daya kepada Kepala BIN Papua Barat Daya yang baru bertugas. 2. Pemaparan tugas dan fungsi BPP Papua Barat Daya dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua. 3. Penyampaian capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja selama tahun 2025. 4. Diskusi mengenai penguatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga. 5. Pembahasan pentingnya menjaga stabilitas wilayah sebagai prasyarat utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Papua Barat Daya. 6. Penguatan sinergi kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan BIN Papua Barat Daya dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. 7. Identifikasi berbagai isu strategis daerah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat. 8. Dukungan terhadap implementasi program percepatan pembangunan Papua yang meliputi: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta penguatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur wilayah.
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya kesamaan pemahaman mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam

	<p>mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran BIN dalam memberikan informasi terkait dinamika sosial di wilayah yang memiliki potensi konflik menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pada sektor Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 3. Sinergi antara BPP Papua Barat Daya dan BIN Papua Barat Daya dinilai penting dalam mendukung stabilitas wilayah dan keberhasilan pembangunan daerah. 4. Koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat guna memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 5. Stabilitas sosial dan keamanan wilayah menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. 6. Kolaborasi antar lembaga diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan percepatan pembangunan Papua.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kerja sama kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan BIN Papua Barat Daya. 2. Membangun sinergi dan koordinasi berkelanjutan antara kedua lembaga dalam mendukung pembangunan daerah. 3. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi terkait isu strategis pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. 4. Mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas wilayah yang kondusif bagi pembangunan.



5. Mengoptimalkan peran BPP Papua Barat Daya dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
6. Mendukung penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga negara, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Dokumentasi

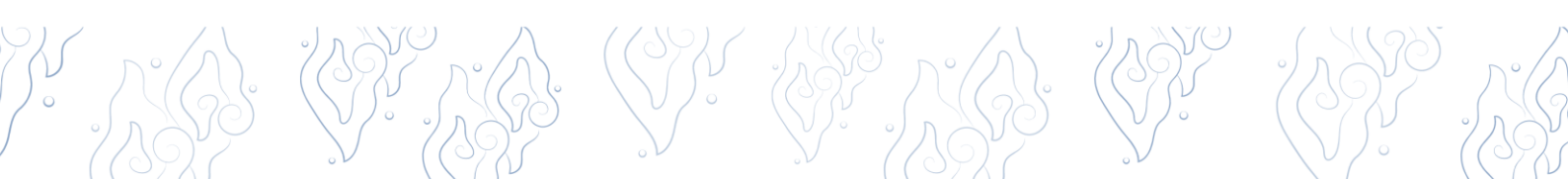


Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja BPP Papua Barat Daya ke SD YPK V Efata Remu dalam rangka Monitoring dan Penguatan Pendidikan Dasar
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 27 Februari 2026 bertempat di SD YPK V Efata Remu, Kota Sorong
Latar Belakang	<p>Pendidikan dasar merupakan salah satu fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, tenaga pendidik yang cukup, serta proses pembelajaran yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dasar.</p> <p>Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar berjalan dengan baik, diperlukan peninjauan langsung di lapangan guna melihat kondisi fasilitas pendidikan, proses belajar mengajar, serta berbagai kendala operasional yang dihadapi oleh sekolah. SD YPK V Efata Remu sebagai salah satu sekolah yayasan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua di Kota Sorong.</p> <p>Selain itu, kunjungan ini juga dilakukan untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di sekolah tersebut, termasuk melihat pemanfaatan bahan pangan lokal Papua dalam menu makanan yang disediakan bagi para siswa.</p>
Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)	Melaksanakan monitoring terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar, mengidentifikasi ketersediaan tenaga pendidik serta berbagai kendala operasional yang dihadapi oleh sekolah, sekaligus

	memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD YPK V Efata Remu Kota Sorong.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan BP3OKP Wilayah Papua Barat Daya 2. Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD YPK V Efata Remu 3. Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya 4. Kepala SPPG dan Koordinator Wilayah BGN Kota Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi, Koordinasi, serta Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar
Misi/Keterangan	Papua Cerdas dan Papua Produktif
Poin-Poin Pembahasan	<p>Dalam kunjungan kerja tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di SD YPK V Efata Remu, termasuk kondisi ruang kelas, ruang perpustakaan, serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, dilakukan diskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru terkait kebutuhan buku bacaan, alat peraga edukatif, serta kendala operasional yang dihadapi oleh sekolah yayasan, termasuk persoalan distribusi tunjangan bagi guru honorer. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah tersebut, khususnya terkait penggunaan menu lokal Papua seperti pisang, keladi, petatas, ikan kuah kuning, serta berbagai jenis sayuran lokal yang diperoleh dari pedagang Orang Asli Papua di Pasar Remu Kota Sorong.</p>
Hasil Kegiatan	<p>Hasil kunjungan menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas sekolah yang memerlukan perhatian, salah satunya ruang perpustakaan yang membutuhkan renovasi agar dapat mendukung kegiatan literasi siswa secara optimal. Selain itu, teridentifikasi adanya kekurangan buku paket literasi yang diperlukan untuk</p>

	<p>mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Melalui kegiatan ini juga berhasil dihimpun data terkait jumlah guru dan siswa sebagai bagian dari pemutakhiran data pendidikan daerah. Dari pemantauan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, diketahui bahwa penggunaan menu berbasis bahan pangan lokal Papua cukup diminati oleh para siswa dan berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan tersebut.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>BPP Papua Barat Daya merekomendasikan agar kebutuhan sarana pendidikan seperti buku literasi dan renovasi ruang perpustakaan dapat diusulkan melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong, baik melalui anggaran perubahan maupun skema bantuan hibah pendidikan. Selain itu, BPP juga mendorong agar penggunaan bahan pangan lokal Papua dalam program Makan Bergizi Gratis semakin ditingkatkan dan dioptimalkan oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Kota Sorong, karena selain mendukung pemenuhan gizi peserta didik, kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Orang Asli Papua yang menjadi pemasok bahan pangan lokal.</p>

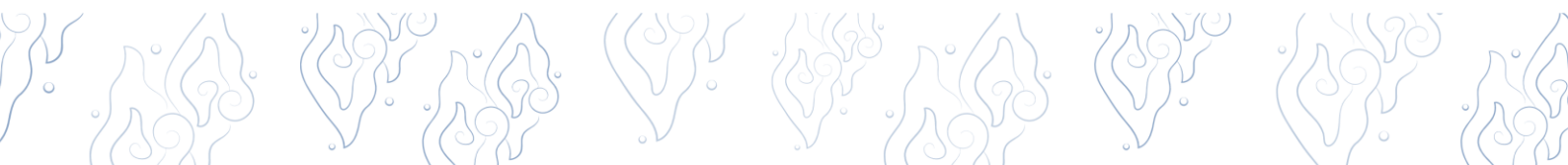


Dokumentasi

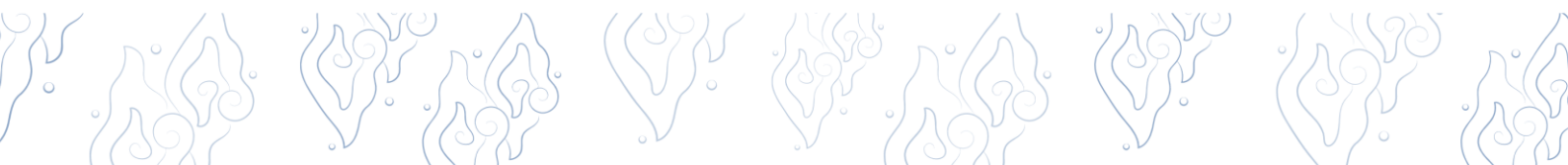


Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Koordinasi dan Penguatan Sinergi Kelembagaan antara BPP Papua Barat Daya dan DPR Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 27 Februari 2026 bertempat di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Latar Belakang	Kunjungan kerja DPR Kota Sorong jalur Otonomi Khusus (Otsus) dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan serta berbagi pengalaman terkait pemahaman regulasi pembangunan dalam kerangka



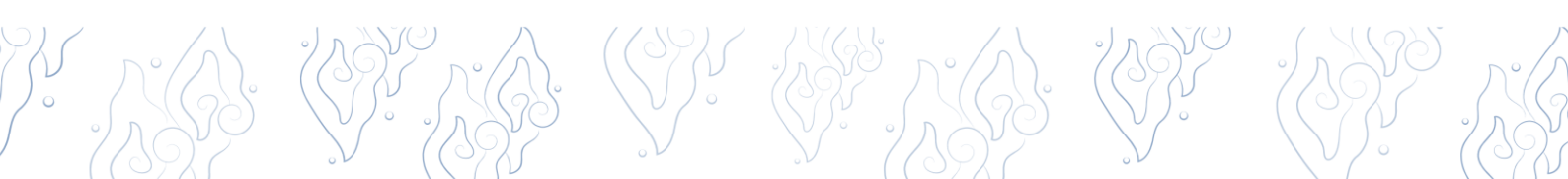
	<p>Otonomi Khusus Papua. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPR Kota Sorong memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai regulasi pembangunan Papua, termasuk Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).</p> <p>BPP Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta DPR jalur pengangkatan merupakan lembaga yang dihadirkan oleh negara sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua dalam kerangka paradigma baru pembangunan Otonomi Khusus Papua Tahun 2021–2041.</p> <p>Dalam konteks tersebut, diperlukan koordinasi dan penguatan sinergi antara BPP Papua Barat Daya dan DPR Kota Sorong guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan fungsi legislasi dan pengawasan DPR, sehingga berbagai program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.</p>
<p>Tujuan Kegiatan (Tujuan Pokja dalam Kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi terkait peran dan fungsi masing-masing lembaga. 2. Melakukan sinkronisasi regulasi pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada Orang Asli Papua (OAP). 5. Mendukung sinkronisasi dan harmonisasi peran BPP dalam menunjang tugas dan fungsi DPR Kota Sorong jalur pengangkatan.



	<ol style="list-style-type: none"> 6. Membangun kesepahaman mengenai prioritas program pembangunan dalam kerangka Papua Produktif melalui RIPPP dan RAPPP. 7. Mengidentifikasi hambatan regulasi di tingkat kota yang dapat mempengaruhi produktivitas ekonomi lokal.
Peserta Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya 2. Anggota DPR Kota Sorong jalur Otonomi Khusus 3. Kepala Subbagian Hukum serta Staf Anggota Pokja BPP Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK).
Misi/Keterangan	RIPPP (seluruh misi)
Poin-Poin Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan DPR Kota Sorong jalur Otonomi Khusus. 2. Sinkronisasi regulasi pembangunan daerah dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. 3. Evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan implementasi Otonomi Khusus Papua. 4. Penyampaian maksud dan tujuan kunjungan kerja DPR Kota Sorong jalur pengangkatan. 5. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi BPP dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. 6. Diskusi dan tanya jawab terkait sinkronisasi peran DPR Kota Sorong dengan tugas dan fungsi BPP melalui peran strategis Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam/Damai. 7. Penjelasan mengenai tata cara optimalisasi pengawasan penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui pemahaman dokumen RIPPP, RAPPP, dan SIPPP.

<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnnya komitmen kerja sama antara DPR Kota Sorong jalur Otonomi Khusus dan BPP Papua Barat Daya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. 2. Terbangunnya pemahaman bersama mengenai peran dan fungsi kedua lembaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Sorong. 3. Kesepakatan untuk mengoptimalkan peran dan tugas BPP Papua Barat Daya dan DPR Kota Sorong jalur pengangkatan dalam mendukung implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua. 4. Kesepakatan untuk menjadikan BPP Papua Barat Daya sebagai salah satu mitra strategis dalam pembahasan Musrenbang di Kota Sorong, sehingga program pembangunan daerah dapat selaras dengan RIPPP dan RAPPP serta dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran nasional.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPP Papua Barat Daya berkomitmen untuk melaksanakan pendampingan dan kolaborasi bersama DPR Kota Sorong jalur Otonomi Khusus. 2. Melakukan pendampingan melalui kegiatan reses DPR serta penyusunan rencana program pembangunan yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus. 3. Menindaklanjuti rencana kerja sama kelembagaan melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPP Papua Barat Daya dan DPR Kota Sorong. 4. Melaksanakan pertemuan lanjutan dengan seluruh fraksi DPR Kota Sorong guna memperkuat kesamaan persepsi dalam mengawal program pembangunan di Kota Sorong.

Dokumentasi



BAB IV

CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Capaian

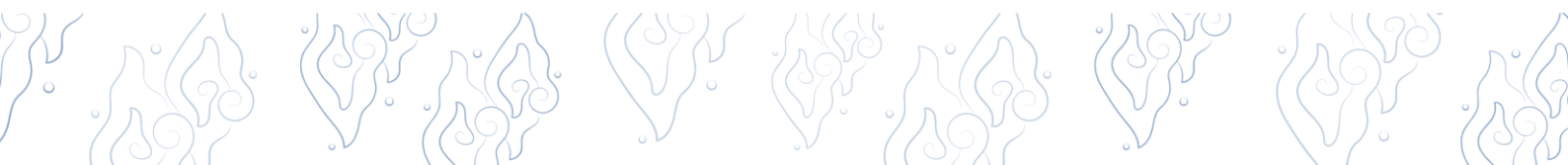
Selama periode Februari 2026, Badan Pengarah Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) secara aktif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Capaian yang diperoleh meliputi:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

- a. Terlaksananya berbagai forum koordinasi antara BPP Papua Barat Daya dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta mitra pembangunan.
- b. Terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rencana pembangunan fasilitas kesehatan melalui kerja sama dengan Siloam Group.
- c. Terjalinnnya komunikasi kelembagaan dengan berbagai lembaga nasional, antara lain Kementerian Kesehatan, Bappenas, serta kementerian teknis lainnya dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

2. Penguatan Pelaksanaan Misi Papua Sehat

- a. Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penguatan sistem layanan kegawatdaruratan melalui pengembangan Public Safety Center (PSC) 119 di Provinsi Papua Barat Daya.
- b. Dilaksanakannya sinkronisasi kebijakan kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka penyelarasan program pembangunan kesehatan di wilayah Papua.
- c. Terlaksananya koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasca perubahan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).



3. Dukungan terhadap Misi Papua Cerdas

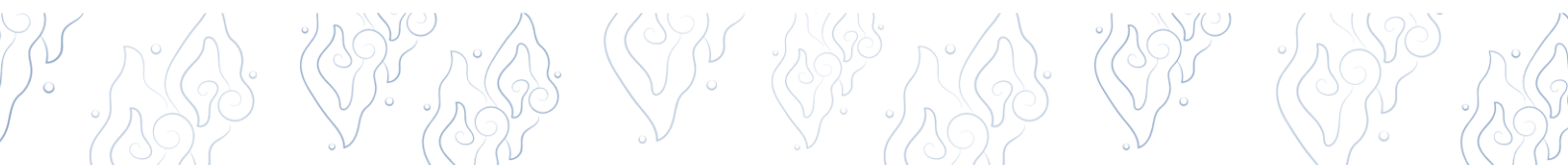
- a. Terlaksananya audiensi dengan komunitas penerima beasiswa Mata Garuda Papua Barat Daya dalam rangka penguatan akses beasiswa LPDP bagi putra-putri Papua Barat Daya.
- b. Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 guna mendukung penguatan kebijakan pendidikan nasional.
- c. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw terkait penyusunan Masterplan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
- d. Terjalinnnya kerja sama dengan peneliti bahasa internasional dalam rangka penguatan dokumentasi bahasa daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal di Papua Barat Daya.

4. Dukungan terhadap Misi Papua Produktif

- a. Terlaksananya koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat terkait penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan ruas jalan strategis Susumuk–Bintuni dan Mare–Fef.
- b. Terlaksananya audiensi dengan PT Gag Nikel dalam rangka penguatan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah melalui program CSR dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
- c. Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan akses masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Sorong Selatan.
- d. Teridentifikasinya potensi pengembangan program cetak sawah serta revitalisasi fasilitas industri berbasis kehutanan sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

5. Penguatan Stabilitas Sosial dan Sinergi Pembangunan Daerah

- a. Partisipasi BPP Papua Barat Daya dalam kegiatan Syukuran 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi pembangunan daerah.
- b. Partisipasi dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sorong sebagai momentum memperkuat hubungan kelembagaan dan stabilitas sosial masyarakat.



- c. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

4.2 Permasalahan

Meskipun berbagai capaian telah diperoleh, terdapat sejumlah permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut:

1. Permasalahan Layanan Kesehatan

- a. Perubahan data pada DTSN yang berdampak pada penonaktifan kepesertaan PBI JKN bagi sebagian masyarakat.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di beberapa wilayah kabupaten/kota.
- c. Belum optimalnya implementasi sistem layanan kegawatdaruratan terpadu PSC 119 di Papua Barat Daya.

2. Permasalahan Infrastruktur dan Konektivitas

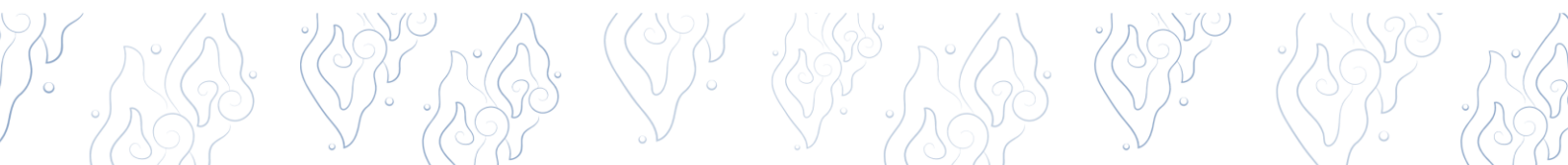
- a. Kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah pedalaman masih belum mantap.
- b. Keterbatasan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat pelayanan dasar.
- c. Tingginya biaya logistik akibat keterbatasan konektivitas antarwilayah.

3. Permasalahan Pengembangan Pendidikan

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa daerah.
- b. Masih terbatasnya kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Belum optimalnya integrasi program pendidikan daerah dengan kebijakan pendidikan nasional.

4. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Daerah

- a. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah belum sepenuhnya optimal.
- b. Keterbatasan dukungan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.
- c. Perlunya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.



4.3 Tantangan

Selain permasalahan teknis, terdapat beberapa tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua Barat Daya:

1. Penguatan Sinkronisasi Lintas Sektor

Mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan.

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan.

3. Peningkatan Konektivitas Wilayah

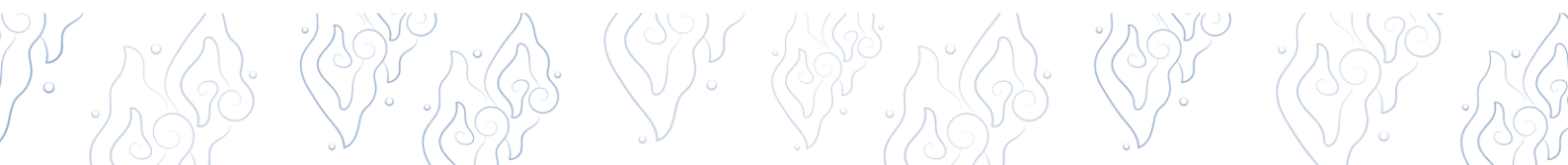
Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna membuka akses wilayah pedalaman serta menurunkan biaya logistik.

4. Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang di Papua Barat Daya.

5. Penguatan Kolaborasi Pembangunan

Mendorong kerja sama yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.



BAB V

PENUTUP

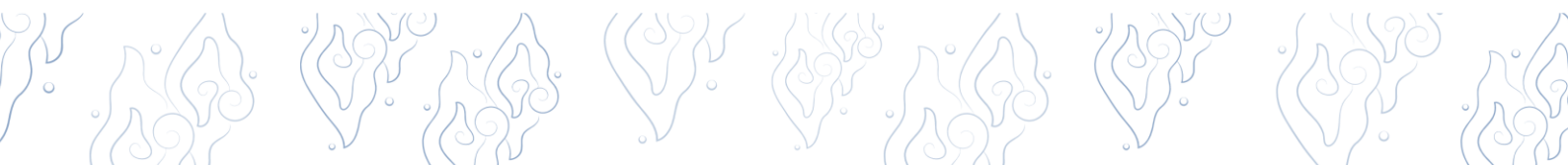
5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya selama periode Februari 2026 menunjukkan bahwa peran Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) berjalan secara aktif dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama periode ini menunjukkan bahwa Badan Pengarah memiliki posisi strategis dalam mengawal implementasi kebijakan pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Penguatan koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
2. Dukungan terhadap pencapaian misi pembangunan Papua, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan koordinasi dan pendampingan kebijakan.
3. Penguatan konektivitas dan pengembangan ekonomi daerah melalui koordinasi pembangunan infrastruktur strategis serta sinergi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan wilayah.
4. Penguatan kolaborasi kelembagaan dan stabilitas sosial daerah melalui berbagai forum komunikasi, koordinasi, dan partisipasi dalam kegiatan pemerintahan daerah.
5. Peran aktif Badan Pengarah dalam pengawalan kebijakan pembangunan Papua, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional serta kerangka percepatan pembangunan Papua.



Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

5.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas capaian, permasalahan, dan tantangan yang telah diidentifikasi, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- b. Mendorong integrasi kebijakan percepatan pembangunan Papua dengan program pembangunan daerah.

2. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

- a. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
- b. Mendukung pengembangan konektivitas wilayah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

3. Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

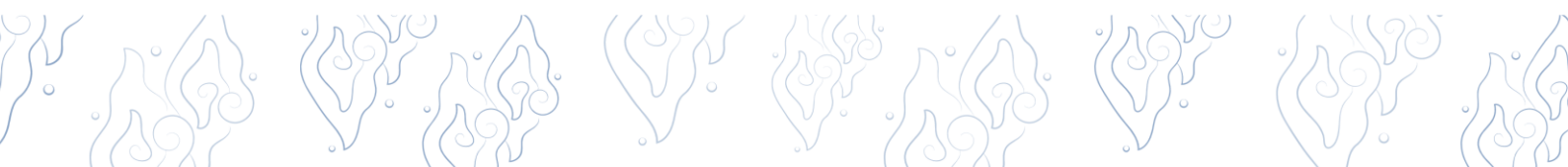
- a. Mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.
- b. Mendukung pengembangan program pendidikan dan beasiswa bagi putra-putri Papua Barat Daya.

4. Penguatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya alam daerah.
- b. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

- a. Mendorong penguatan sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan berbasis indikator kinerja.



- b. Mengoptimalkan peran Badan Pengarah dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

5.3 Penutup

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengarah Papua Barat Daya Periode Februari 2026 ini menjadi gambaran komprehensif atas dinamika pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Papua Barat Daya.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi:

1. Bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan;
2. Dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
3. Instrumen penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan.

Ke depan, komitmen bersama, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Papua Barat Daya, khususnya Orang Asli Papua (OAP), menjadi kunci dalam memastikan bahwa percepatan pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Badan Pengarah Papua Barat Daya akan terus berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan percepatan pembangunan Papua agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional serta prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.